

No. 197 Juli 2022

BaKTI News

www.baktinews.bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**KONSEP PENDIDIKAN UNTUK
KAWASAN TIMUR INDONESIA**

MINORITAS, MARGINAL, DAN RENTAN

MENATA PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

TIDAK DIPERJUALBELIKAN
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771 979 777 057



BaKTINews
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

www.baktinews.bakti.or.id

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**
ZUSANNA GOSAL
Editor **VICTORIA NGANTUNG**
ITA MASITA IBNU

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383

Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id

Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: www.baktinews.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on www.baktinews.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews**** Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

MENJADI PELANGGAN BaKTINews**** Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online baktinews.bakti.or.id untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

Daftar Isi

BaKTI**News**

Juli 2022

No. **197**

- 1** Konsep Pendidikan untuk Kawasan Timur Indonesia
Oleh **WILLI TOISUTA**
- 9** Minoritas, Marginal, dan Rentan
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 14** Bagaimana Indonesia dapat Meningkatkan Kualitas Layanan dan Universalisasi Akses Internet?
Oleh **PUTU SANJIWACIKA WIBISANA, UTZ PAPE, SAILESH TIWARI**
- 17** Tonggak Baru Pencegahan Perkawinan Anak
Oleh **LUSIA PALULUNGAN**
- 21** Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau Rakyat (*Bagian 1*)
Oleh **TIM PENELITI SMERU**
- 25** Ketimpangan Riset Lingkungan di Indonesia Timur yang Perlu Segera Diatasi
Oleh **ROBBY IRFANY MAQOMA**
- 29** Problem Perempuan Penjaga Hutan: Akses Minim Hingga Kesenjangan
Oleh **TABAYYUN PASINRINGI**
- 33** Menata Pusat Pertumbuhan Wilayah
Oleh **A.M. SALLATU**
- 35** Dukung 9.000 Petani Kakao Capai Pendapatan Hidup Berkelanjutan pada 2030
- 38** Lidi Melintas Negeri
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 40** Diskusi *IG Live@infobakti & Podcast* Basuara
- 41** Terbaru di Batukarinfo

Foto cover: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI



KONSEP PENDIDIKAN UNTUK KAWASAN TIMUR INDONESIA

Oleh **WILLI TOISUTA**

Konsen untuk membahas topik ini berhubungan dengan adanya kenyataan (masa sebelumnya) bahwa sistem pendidikan nasional tidak sensitif secara kontekstual dan tidak fungsional¹ bagi Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan oleh karenanya telah terjadi diskrepansi dalam berbagai dimensi dan mutu antarkawasan, dan dalam KTI sendiri. Akibatnya *brain power* KTI tidak teraktualisasi secara optimal untuk mengarahkan pendidikan, dan lebih penting lagi, memanfaatkan potensi sendiri dan produktivitas riset serta kekuatan ilmu pengetahuan abad XXI bagi kepentingan kemajuan yang diinginkan oleh dan untuk Kawasan Timur Indonesia. Kebijakan *one-size fits all* ternyata tidak menguntungkan secara nasional.



Foto: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

Dalam implementasinya kita belajar bahwa sistem nasional memiliki kapasitas yang terbatas untuk menjamin terjadinya *delivery system* yang berbobot-sama bagi semua kawasan. Di samping itu terdapat juga kemampuan distribusi dan redistribusi sumber daya, sarana-prasarana dan terutama SDM penopang pendidikan yang tidak merata. Inilah penyebab utama yang turut menciptakan diskrepansi antar kawasan di Indonesia dalam performa pendidikan bangsa secara kolektif. Amanah Konstitusi NKRI tentang



equality of educational opportunity for all (Kesetaraan kesempatan Pendidikan bagi semua) ternyata belum mampu disertai dengan kebijakan mengenai *equity* (keadilan) yaitu jaminan untuk memperoleh layanan dan topangan pendidikan yang sama bagi semua anak bangsa dalam semua dimensinya terutama proses pembelajaran yang bermutu pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

Kerangka Acuan Webinar yang digagas dan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022

secara implisit mempersoalkan isu ini dan memberi nuansa kuat tentang pentingnya orientasi *scientific* yang pro Kawasan Timur Indonesia.

Unek-unek yang berkeberatan terhadap *one-size-fits-all policy* seharusnya sudah lama kita nyatakan sebagai usang dan memajangnya saja dalam museum sebagai suatu kebenaran sejarah.

Adalah lebih baik bagi kita untuk menggunakan semaksimal mungkin



Foto: Fauzan Ijazah/KIAT Guru

kesempatan yang tersedia tentang otonomi, desentralisasi, dan sekarang tentang dorongan Pemerintah untuk pengembangan talenta digital melalui berbagai program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital, *Digital Talent Scholarship*, dan *Digital Leadership Academy*². Kita harus memanfaatkan hak berdemokrasi abad ke XXI ini dan menjadikannya sebagai kekuatan kolektif yaitu *bargaining power* berbasis pengetahuan moderen untuk dijadikan *engine of growth* bagi masa depan KTI yang *self-propelling* berbasis pendidikan yang kontekstual dan fungsional. Yang disebutkan terakhir ini adalah tantangan baru dan karenanya membutuhkan model yang tepat bagi *Human Capital Formation* untuk KTI.

Tetapi, harus kita ingat bahwa KTI sendiri amat luas dan beragam corak dan ciri khasnya. Itulah sebabnya, siapakah yang dapat memberi satu peta jalan sebagai solusi yang *uniform* bagi

pembangunan kawasan kita yang berdimensi jamak ini.

KTI dan Dimensi Pendidikan Masa Depan

Upaya membuat skenario pendidikan yang kontekstual dan fungsional bagi KTI untuk masa depan akan merupakan tantangan yang amat kompleks. Dengan mengemukanya peranan yang signifikan dari *Artificial Intelligence* kita disadarkan bahwa berbagai misteri kehidupan dapat diurai dan ditemukan solusinya dengan topangan penelitian dan ilmu pengetahuan. Secara singkat kehidupan kita dalam era revolusi industri 4.0 sekarang ini ditandai dengan tiga realitas dimana: (i) data merupakan *currency* atau basis pengembangan segala kebijakan utama; (ii) *artificial intelligence* menjadi faktor penentu bagi pengambilan keputusan, dan, (iii) otomasi menjadi norma. Inovasi yang berkesinambungan, bahkan

disruptif, lahir dari sinergi, kemampuan dan kekuatan ketiga realitas tersebut yang memungkinkan integrasi antara teknologi, dunia maya dan manusia. Hasilnya adalah suatu kolaborasi jaringan yang memiliki kandungan data yang amat kaya. Tersedianya data yang sedemikian besar (*big data*) memungkinkan diadakannya analisis dan perhitungan dengan presisi yang tinggi untuk kepentingan berbagai rekayasa teknologi seperti simulasi otomatis dan *intelligent robots* untuk menopang produktivitas industri dan kepentingan pertumbuhan ekonomi global.

Penetrasi nilai-nilai baru yang menyatu dengan kemajuan teknologi akan terus terjadi dan memengaruhi pola hidup manusia. Karena kenyataan tersebut tidak akan berhenti, maka kita membutuhkan rancangan pendidikan yang dapat mengakselerasi teknologi sedemikian rupa agar manusia dan teknologi memiliki sinergi yang dinamik dan positif. Dimensi ini antara lain menjadi dasar bagi Jepang untuk mengembangkan masyarakat 5.0 di mana peranan teknologi moderen akan diintegrasikan secara bertanggung-jawab dan berkelanjutan dengan kualitas hidup. Dalam konteks masyarakat 5.0, kehidupan individual dan masyarakat akan ditopang oleh relasi manusia dan mesin. Relasi tersebut hanya bisa terjadi secara saling menopang apabila persepsi manusia berkembang secara benar dan ditopang pula oleh tingkat kognisi dan perilaku yang matang. Masyarakat yang berubah tersebut harus memperoleh jaminan dan perlindungan pemerintahnya pada aspek legal, etik dan keamanan dalam berbagai bentuk, terutama dalam relasi antar sesama manusia, dan antara manusia dan mesin. Itulah sebabnya Jepang mengantisipasi kesejahteraan masa depan berbasis teknologi yang *human centric*.

Mengapa masyarakat masa depan yang ditopang dengan transformasi digital dikemukakan dalam kerangka pembicaraan

tentang masa depan pendidikan di KTI apakah tidak *over-ambitious*?

Kita jangan lengah sedikitpun terhadap kenyataan bahwa masa depan pun sudah hadir sekarang di KTI, oleh karena itu KTI tidak *IMMUNE* terhadap perubahan dan implikasinya yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk rancangan dan sistem pendidikan untuk KTI. *Stock of knowledge* dan *experience* dalam mengelola dan mengembangkan pendidikan di KTI selama ini tidak dengan begitu saja merupakan jaminan untuk diextrapolasi ke suatu masa depan KTI yang *unprecedented*. Model *one step at a time progression* tidak pernah akan membuat KTI menjembatani ketertinggalannya di masa depan yang berubah dengan sangat cepat. *Benchmarking* dengan sistem pendidikan yang telah maju juga hanya memperpanjang ketertinggalan kita karena yang di *bench-marked* tidak akan menunggu “kedatangan” kita, sebab ada kepentingan mereka untuk selalu memutakhirkan sistemnya sendiri. Berkejar-kejaran dengan masa depan yang berubah harus terjadi, sebab temuan penelitian yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang baru terjadi secara eksponensial – bukan hanya merombak *body of knowledge* yang eksis. Pengetahuan baru tersebut bahkan membongkar asumsi-asumsi lama dan membuatnya menjadi usang padahal itulah yang selama ini kita rujuk sebagai kebenaran yang dipercaya. Dalam hubungan ini, sangat menarik pendapat Luthfi Dzulfikar³ tentang pentingnya kita membebaskan diri dari tradisi ikut-ikutan tren belaka. Harus ada gerakan dekolonisasi ilmu yang terlalu didominasi oleh pemikiran bangsa lain. Harus ada otoritas untuk menyelidiki sendiri agar dapat mengangkat derajat pengetahuan kita yang sudah ada berabad-abad lamanya (cf. candi Borobudur, dan lain-lain). Kita harus mampu keluar dari kemutlakan sains yang lahir dari proses dominasi bangsa tertentu saja.



Foto: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI

Kita sudah dapat mendeteksi adanya kecenderungan untuk mengembangkan teori wawasan ilmiah dari konteks sendiri yang harus memiliki derajat yang sama dan setara dalam produksi pengetahuan secara global di kalangan intelektual kita. Dengan sendirinya model pendidikan KTI di masa depan juga harus sensitif terhadap perkembangan mutakhir ini, terutama dalam rangka produksi pengetahuan yang kontekstual dan fungsional bagi KTI. Keharusan ini ini akan selalu menempatkan KTI dalam *critical tension* yang menarik.

Menjembatani ketertinggalan dalam masyarakat yang sedang bertransformasi secara digital bukanlah merupakan hal yang sederhana. Walaupun upaya tersebut pasti dilaksanakan secara serius terutama dengan pemerintah sebagai ujung tombaknya, kesenjangan digital akan semakin melebar karena tidak ada jaminan terjadinya *digital* dan

technological equality di antara bangsa-bangsa. Kesenjangan dalam gap digital turut menciptakan kesenjangan antara individu, etnis, ras, bangsa sampai pada rumah tangga. Bangsa-bangsa yang mampu menggunakan teknologi maju sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi biasanya menguasai juga industri dan bisnis, dan mereka menunjukkan kesejahteraan materil secara menyolok berbeda dengan negara yang masih menjadi konsumen dari kemajuan teknologi tersebut. Dalam satu negara sendiri perbedaan dan disparitas antar kawasan, pusat dan daerah, kota dan desa sangat kentara karena tidak meratanya distribusi infrastruktur dan teknologi yang menopang berbagai pembangunan sektor kehidupan seperti sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Itulah sebabnya banyak negara berkembang, termasuk Indonesia mulai mengadakan investasi dalam teknologi modern

termasuk teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu solusi yang kritical untuk menjembatani kesenjangan di atas. Dalam hubungan dengan itu hanya layak apabila pembangunan KTI menjelang masa emas Indonesia 2045, juga akan, dan harus dipengaruhi oleh ke 3 ciri masyarakat industrial 4.0 yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu: (1) data adalah *currency* bagi pembangunan; (ii) AI penentu bagi pengambilan keputusan dan (iii) Automasi adalah norma.

Pendidikan adalah salah satu sektor yang mendapat perhatian luar biasa dari negara dan provinsi di Indonesia karena pentingnya pengadaan SDM yang akan mengisi keperluan pembangunan di masa depan. Berbagai program pendidikan lanjut keluar dan di dalam negeri dipromosikan bahkan ditambahkan syarat penting untuk memilih Perguruan Tinggi terbaik dan bermutu. Ini menandai komitmen untuk mencapai dan meraih puncak-puncak kemajuan ilmu dan teknologi - tidak lain agar kesenjangan yang menyebabkan keterbelakangan dalam berbagai sektor teratasi.

Memasuki Era Indonesia Maju menjelang NKRI berusia 100 tahun (2045), *Quantum-leap* dalam percepatan *Human Capital Formation* untuk KTI juga tidak dapat dihindari. Itulah sebabnya kesempatan yang disediakan untuk mengembangkan *brain-power* KTI harus digunakan secara terencana antara lain dalam memilih bidang keahlian yang relevan dengan SDA, tipologi geografis wilayah, komposisi demografis dan aspirasi masyarakat kita. Hal yang amat penting diingat dalam pengembangan SDM KTI di luar negeri, adalah *return strategy* yang tepat sasaran. Ini berhubungan dengan pengalaman yang selalu terjadi apabila para pakar yang kembali ke daerah tidak difungsikan secara optimal dan efektif. *Brain gain* yang kita mimpikan dengan mudah dapat berubah menjadi *brain-drain* dan *brain-train* karena mereka yang *under-utilized* dan tidak direspek dengan selayaknya, dengan

mudah dapat melompat ke gerbong-gerbong transportasi modern yang dapat membawa mereka ke padang lain yang berumput hijau dengan mata air yang tenang dan menyegarkan kehidupan mereka dan keluarganya.

Bagian lain dari *critical tension* yang disebutkan sebelumnya adalah hasil perbuatan kita sendiri. Karena *collective performance* dari sistem pendidikan nasional yang masih bermutu rendah bagi sebagian besar anak bangsa, maka telah dan akan terjadi kesenjangan sosial-ekonomi dan pendidikan yang memengaruhi status dan kesejahteraan, yang berkelanjutan di antara anak bangsa sendiri. Itulah sebabnya menerawang ke masa depan KTI kita perlu merumuskan perencanaan pendidikan yang lebih fundamental untuk mewujudkan *no child will be left behind* di KTI.

Ada beberapa konsep kritical yang dapat diidentifikasi di sini.

1. Revitalisasi amanah “mencerdaskan kehidupan (anak) bangsa”. Rancang bangun pendidikan KTI harus memiliki fondasi yang tepat dan kokoh dengan visi yang transformatif.

Amanah konstitusi kita tidak hanya mengutamakan prinsip *equality of education for all*, tetapi juga *equity* dan *quality*. Kecerdasan anak bangsa adalah potensi yang intrinsik dan karenanya harus direvitalisasi kapasitasnya. Dapat diidentifikasi 4 kapasitas belajar pada setiap anak yang perlu diaktualisasikan secara optimal. Kapasitas intelektual berhubungan dengan anugerah untuk mengembangkan intelektualitas manusia. Kita telah mengetahui bahwa inteligensi manusia ternyata tidak ada batas yang menghalangi penerawangannya. Itulah sebabnya perlu diaktualisasikan kapasitas yang melekat pada anak manusia yaitu kapasitas sosial untuk menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, dan alam semesta. Solidaritas tersebut amat penting untuk mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan dan kesejahteraan bersama



Foto : Asian Development Bank

agar tidak terjadi *digital dictatorship* dalam mengatur kehidupan bersama. Pilihan-pilihan yang benar perlu mendasari keputusan intelektual dan sosial karenanya membutuhkan pertimbangan nurani yang jernih yang bersumber pada kata-hati. Itulah sebabnya proses pendidikan perlu mengaktualisasikan kapasitas nurani pada anak manusia. Akhirnya semua keputusan untuk bertindak oleh manusia harus didasarkan pada kesadaran yang agung bahwa perilakunya suatu hari akan dipertanggung-jawabkan pada Tuhan. Ini menjadikan aktualisasi kapasitas spiritual pada anak didik sangat penting.

Ki Hadjar Dewantoro (KHD) dengan sangat tepat merumuskan bahwa cara yang paling tepat untuk mengaktualisasikan kapasitas anak manusia ialah melalui pendekatan yang non-intrusif⁴ dalam proses pembelajaran. Sahihnya prinsip dan pendekatan KHD tidak dapat

disangkal terutama dalam mengkonstruksi *discipline of mind* pada para siswa. Hanya saja dalam kehidupan konkrit sehari-hari, berpihak kepada yang benar, yang baik dan yang adil, selalu akan berhadapan dengan berbagai tantangan yang *unprecedented*. Itulah sebabnya institusi pendidikan harus memiliki strategi pembelajaran yang perkasa untuk meramu dan kemudian mengemas prinsip non-intrusif KHD dengan prinsip non-apolojetik, dan non-kompromistik. Non-intrusif menghargai kebebasan untuk membentuk pendirian tanpa paksaan; non-apolojetik mempertahankan pendirian tanpa maaf; dan non-kompromistik mendemonstrasikan kebenaran dan keadilan tanpa kompromi. Dimensi ini menguatkan pendapat sebelumnya tentang pentingnya proses dekolonialisasi pengetahuan yang mendominasi kebiasaan kita dalam merencanakan pendidikan kita selama ini.

Lulusan dari institusi pendidikan di KTI apapun jenjang dan jenisnya harus dipersiapkan menjadi pilar utama yang mampu memengaruhi *the forces of change* dan bukan sekedar seorang pakar *maintenance* dari roda pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Tampak jelas bahwa hal tersebut menuntut akuntabilitas guru dalam proses meretas *improved student learning*.

Masih ada satu dimensi lagi yang berhubungan dengan pandangan mendasar yang dikemukakan sebelumnya, yaitu perlunya *market ideology* yang terus mempenetrasi konsep dan praktik dunia pendidikan dan dapat memengaruhi arah *Human Capital Formation* (HCF). Selalu akan dituntut kompatibilitas pendidikan dengan tuntutan dunia kerja modern yang menjunjung tinggi performativitas yaitu penguasaan kompetensi yang menjamin kinerja yang efektif dan efisien untuk meningkatkan produktivitas industri dan dunia usaha. Kecenderungan ini dapat mereduksi pembentukan HCF menjadi sempit dan akhirnya turut mengembangkan *new breed of economic monsters* yaitu mereka yang menjunjung *spirit of self-seeking individualism* yang mengejar kompetisi untuk meraih status sosial dan ekonomi dengan renumerasi yang tinggi.

Sistem pendidikan di KTI sebaiknya setuju dengan kalangan yang kritis terhadap adanya pengembangan HCF yang reduktif. Kalangan yang kritis ini kemudian menonjolkan sebagai ciri khas pendidikan abad XXI yaitu pengembangan daya imajinasi. Mereka setuju dengan pendirian Friedman⁵ dkk. (2011) bahwa: *“going forward we are convinced, the world increasingly will be divided between high imagination-enabling countries which encourages and enable the imagination and extras of their people and low-imagination-enabling countries which suppress or simply fail to develop their people’s creative capacities and abilities to spark new ideas, start up new industries and nurture their “extra”.*

Mereka mengajak kita untuk berkeyakinan bahwa hanya komitmen yang konkrit untuk mengembangkan daya imajinasi yang berbasis pada pemikiran kreatif sajalah yang dapat menjadikan bangsa (dalam hal ini penduduk di KTI) menjadi produktif secara berkelanjutan. Dalam hubungan dengan pengembangan daya saing, proses tata-kelola komponen intelektual dalam institusi pendidikan harus dirancang secara eksplisit. Ini berhubungan dengan kepentingan sentral yaitu pengembangan kemampuan berpikir kritis. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun disiplin diri dan penggunaan daya analisis dan rasional untuk membuat keputusan etikal.

Manajemen sistem instruksional yang demikian memerlukan pendekatan paedagogik yang cukup kompleks. Metodologinya perlu menggunakan desain pembelajaran berbasis penelitian (*research-based-teaching-and learning*). Saya mengusulkan agar KTI memilih *learning-paths* dalam koridor yang demikian.

¹ Dalam model yang sederhana, pembelajaran menjadi kontekstual apabila literasinya disesuaikan dengan lingkungan habitat anak, misalnya masyarakat nelayan – pembelajaran tersebut menjadi fungsional jikalau pembelajaran berhitung dihubungkan dengan kegiatan ibunya berjualan ikan di pasar. Bahkan dimensi nilai dapat diselipkan, misalnya tentang kerja keras ayahnya melaut dan menangkap ikan. Demikian juga kejujuran dan ketegasan ibunya dalam interaksi tawar-menawar harga dengan pembelinya. Semua itu dengan sendirinya harus merupakan pendidikan yang bersifat “knowledge-based”.

² Hartarto Airlangga Menko Perekonomian, Pos Kupang 12 Maret 2022. apa ada judul artikel dan linknya?

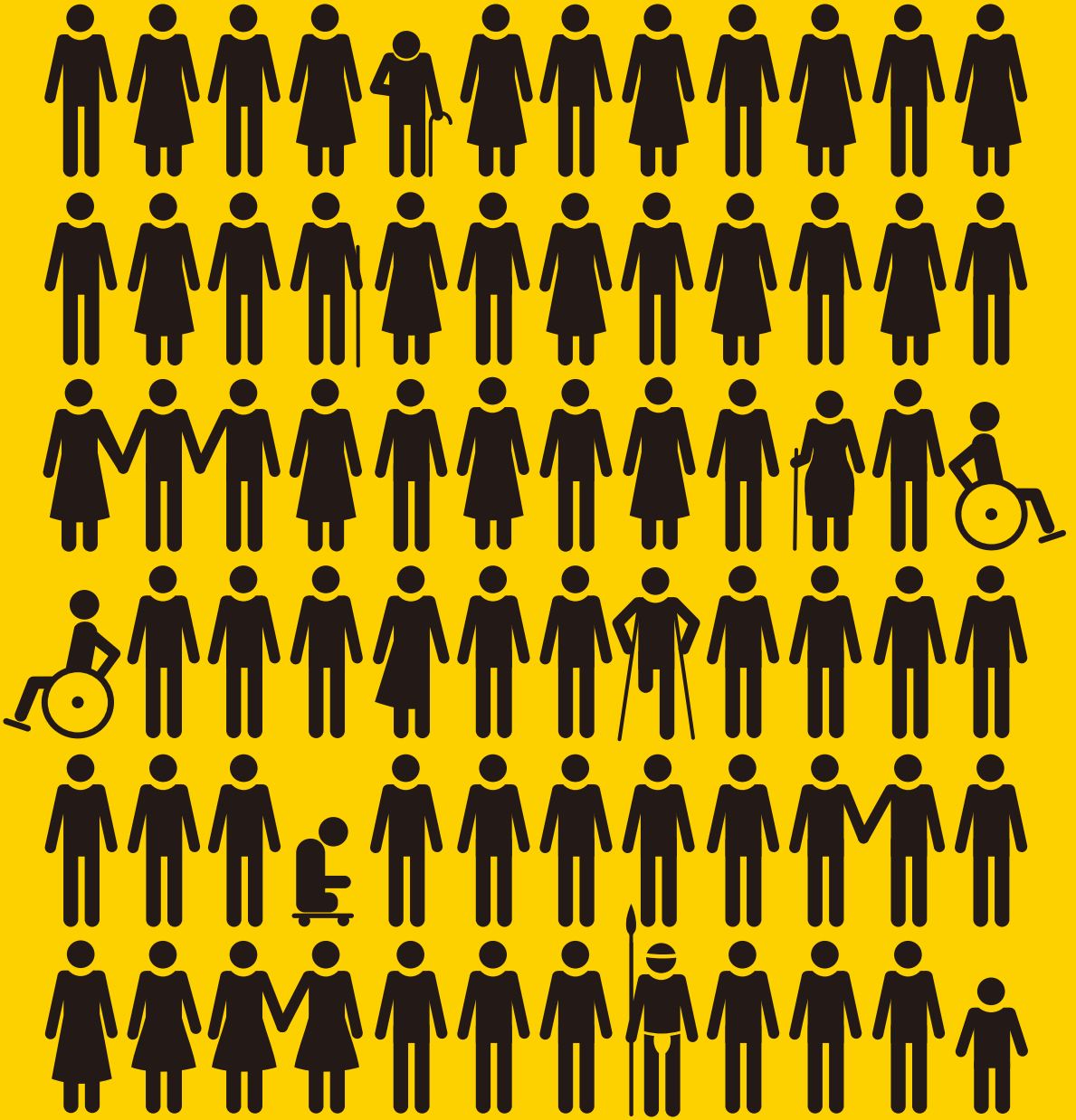
³ Luthfi.dzulfikar@the.conversation.com (16 Maret 2022) apa ada judul artikel dan linknya?

⁴ Ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.

⁵ Thomas Friedman & Michael Mandelbaum (2011), *That Used to be Us: How America Fell Behind in the World and How we can come back*, NY: Farral, Straus & Giroux.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan BaKTI



Iustrasi: Ihsan Djunaed/Yayasan BaKTI

MINORITAS, MARGINAL, DAN RENTAN

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**



elompok dan komunitas tersebut berada dalam posisi minoritas, marginal, dan rentan, sehingga mudah mengalami diskriminasi, kekerasan, dan penindasan.

Tingkat kerentanan dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok-kelompok tersebut tidak selalu sama. Pada kelompok tertentu berada pada situasi yang sangat rumit karena merupakan kelompok yang menyandang lebih dari satu kondisi atau atribut: minoritas, marginal, dan rentan, serta atribut lain yang melekat dan dilekatkan secara sosial. Kelompok ini biasanya mengalami diskriminasi, kekerasan, dan penindasan berlapis.

Diperlukan upaya bersama dalam pembangunan untuk menghapuskan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan dan minoritas, menghubungkan dan membuka akses layanan pemerintah, mendorong dan memperkuat keberdayaan masyarakat untuk mengadvokasi hak-haknya sebagai warga negara. Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) adalah satu dari upaya penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok rentan dan minoritas demi pembangunan yang inklusif.

Yayasan BaKTI sebagai salah satu mitra Program INKLUSI melaksanakan Lokakarya Desain Draft Program INKLUSI bersama lembaga mitra, yakni YLP2EM (Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat) Parepare, YESMa (Yayasan Eran Sangbure Mayang) Tana Toraja, Rumah Generasi Ambon, RPS (Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara) Kendari, UDN (Yayasan Ume Daya Nusantara) Kupang, dan LRC (Lombok Research Center) Lombok Timur. Pelaksanaan lokakarya ini berlangsung 12-14 Mei 2022 lalu.

Lokakarya yang difasilitasi oleh Yohanes Da Masenus Arus dan Retno Agustin dari CIRCLE Indonesia tersebut menghasilkan Draft Program INKLUSI-BaKTI 2022-2025. Selama lokakarya sejumlah data dan informasi yang berhubungan dengan isu-isu inklusi elaborasi dan diperdalam,

seperti isu gender, difabel, kekerasan perempuan, kekerasan anak, etnis minoritas, penganut agama lokal/minoritas, ODHA (orang dengan HIV/AIDS), LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender), OYPMK (orang yang pernah mengalami kusta), lanjut usia (lansia), ODGJ (orang dengan gangguan jiwa), dan sebagainya.

Minoritas

Kelompok minoritas mencakup berbagai komunitas, seperti suku atau etnik minoritas, penganut agama atau kepercayaan lokal dan minoritas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan lansia. Etnik minoritas dan penganut agama lokal terdapat di berbagai wilayah, yang semasa Orde Baru sering disebut sebagai “suku terasing”. Etnik minoritas juga sering mengalami stigma sebagai komunitas terbelakang dan tidak berperadaban, sehingga menghambat kemajuan. Sementara penganut agama lokal sering dituding sebagai komunitas yang tidak beragama dan kafir. Istilah yang diskriminatif dan stigma tersebut menyebabkan etnik minoritas dan penganut agama lokal menjadi kelompok marginal dan rentan.

Komunitas LGBT juga merupakan kelompok minoritas sekaligus marginal dan rentan. Mereka mengalami diskriminasi dan stigma dari berbagai kelompok sosial, termasuk penolakan dari kelompok agama. Sementara OYPMK dan ODHA mengalami stigma sebagai pengidap penyakit yang harus di jauhi. ODGJ dan lansia berada di tengah-tengah masyarakat, namun menjadi terlantar atau dikucilkan dan dicap sebagai orang tidak produktif dan tidak berguna.

Secara sosial, kelompok minoritas menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat, sehingga menjadi kelompok eksklusif dan marginal. Mereka menjadi eksklusif karena ditolak dan tidak diterima secara sosial. Karena minoritas dan marginal, mereka menjadi sangat rentan mengalami kekerasan dan penindasan.



Foto: Dok. Yayasan BaKTI/INKLUSI

Marginal dan Eksklusif

Kelompok minoritas tidak selalu rentan, jika minoritas tersebut tidak eksklusif dan tidak marginal. Komunitas *Bissu* di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, adalah komunitas minoritas dan transgender yang dihormati, sehingga komunitas tersebut tidak marginal dan tidak eksklusif, walaupun mereka juga rentan.

Kelompok minoritas yang disebut di dalam tulisan ini adalah kelompok marginal dan eksklusif. Kondisi eksklusif dan marginal adalah sesuatu yang terjadi karena berbagai kondisi, mulai dari penolakan, stigma, dan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas atau kelompok yang memiliki kekuasaan. Kebijakan politik yang diberlakukan oleh pemerintah juga ikut mengeksklusi dan memarginalkan kelompok minoritas.

Sikap eksklusif suatu komunitas atau suatu kelompok terjadi karena proses-proses penolakan dan stigma yang mereka alami. Sebagai contoh adalah LGBT, ODHA dan OYPMK yang merupakan komunitas yang dieksklusikan secara sosial oleh masyarakat. Komunitas LGBT, ODHA dan OYPMK berada di tengah masyarakat,

termasuk masyarakat di perkotaan. Komunitas tersebut menjadi eksklusif karena stigma dan penolakan dari masyarakat.

Suatu komunitas menjadi marginal dan eksklusif melalui proses yang panjang. Dan sifat marginal dan eksklusif suatu komunitas bisa berubah menjadi inklusif dan tidak marginal karena berbagai faktor. Di Indonesia, LGBT adalah kelompok minoritas dan marginal, namun di beberapa negara LGBT mendapat ruang dan mendapat perlindungan dari negara.

Rentan

Perempuan, anak, dan orang difabel bukanlah minoritas dalam masyarakat. Mereka juga bukanlah kelompok eksklusif, kecuali disabilitas tertentu yang dikucilkan oleh orang tua keluarga. Namun, mereka adalah kelompok marginal dan rentan. Mereka semakin termarginal dan rentan jika menyandang lebih dari status dari kondisi tersebut. Misalnya perempuan difabel atau anak perempuan difabel akan mengalami peningkatan kerentanan. Ketika seorang perempuan difabel mengalami kekerasan, maka peluang mengalami kekerasan



Foto: Dok. Yayasan BaKTI/INKLUSI

akan berlapis. Kekerasan yang dialaminya karena dia adalah seorang perempuan dan sebagai seorang difabel.

Masyarakat patriarki menempatkan perempuan dan anak dalam posisi lebih rendah dari pada laki-laki dewasa. Di banyak budaya dan masyarakat, perempuan dan anak berada dalam pengaturan dan kontrol yang menyebabkan mereka tidak mempunyai posisi dan kekuasaan, termasuk untuk diri dan kehidupan pribadi mereka. Sementara seorang difabel, karena memiliki keterbatasan fisik, mental, dan intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang lama menjadi semakin rentan jika masih menerima perlakuan diskriminasi, stigma, dan berbagai pembatasan.

Interseksionalitas dan Inklusi

Pembuat kebijakan atau petugas sering tidak bisa menganalisis dengan jernih, mengapa individu atau kelompok mengalami kekerasan atau penindasan yang panjang dan berulang, yang kemudian menyalahkan korban. Demikian juga mengapa individu atau kelompok semakin menutup diri dan menjauh dari kelompok

mayoritas. Interseksionalitas adalah salah satu pendekatan yang mencoba menjelaskannya.

Isu sentral bagi teori interseksionalitas adalah pengertian bahwa perempuan mengalami penindasan dalam konfigurasi-konfigurasi yang bervariasi dalam derajat intensitas yang bervariasi juga (Crenshaw, 1991; Ritzer, 2012). Penjelasan untuk variasi itu adalah bahwa semua perempuan mengalami penindasan secara potensial berdasarkan gender, walaupun demikian, perempuan ditindas secara berbeda oleh perpotongan-perpotongan yang bervariasi dari susunan-susunan ketidaksetaraan sosial lainnya. Vektor-vektor penindasan dan hak istimewa itu, yang oleh Patricia Hill Collins (1990) disebut sebagai matrix dominasi mencakup bukan hanya gender, tetapi juga kelas, ras, lokasi global, pilihan seksual, dan usia. Variasi perpotongan-perpotongan demikian mengubah secara kualitatif pengalaman bagi seorang perempuan dan perubahan itu, keberagaman itu, harus diperhitungkan di dalam menceritakan, menjelaskan, dan menilai pengalaman-pengalaman perempuan.

Crenshawe (1989) menunjukkan bahwa perempuan kulit hitam sering mengalami diskriminasi di dalam pekerjaan karena mereka berkulit hitam, tetapi pengadilan secara rutin menolak mengakui diskriminasi tersebut-jika ia tidak dapat ditunjukkan sebagai suatu kasus mengenai apa yang dianggap sebagai diskriminasi umum, diskriminasi seks (baca: juga perempuan berkulit putih), atau diskriminasi ras (baca: juga pria kulit hitam). Menurut Ritzer (2012) bahwa hak istimewa yang diperoleh sejumlah perempuan dan laki-laki bergantung pada penindasan perempuan dan laki-laki lainnya. Karena itu, menurut Crenshawe pendekatan interseksionalitas akan mengurai susunan-susunan ketidaksetaraan tersebut sebagai struktur-struktur hirarkis yang didasarkan pada relasi-relasi kekuasaan yang tidak adil. Tema ketidakadilan menandai fokus kritis yang konsisten dalam analisis interseksionalitas.

Ringkasnya, pendekatan interseksionalitas adalah pendekatan yang mengakui bahwa berbagai identitas sosial, seperti jenis kelamin, gender, disabilitas, orientasi seksual, ras dan etnis, agama, warna kulit, pendidikan, dan sebagainya, saling beririsan dan berinteraksi satu sama lain, yang dapat memperkuat diskriminasi dan pengucilan seseorang/kelompok dalam masyarakat (Program Inklusi, 2022).

Program INKLUSI-BaKTI

Sebagai salah satu pelaksana Program INKLUSI, Yayasan BaKTI bekerja pada tujuh wilayah yaitu Kabupaten Maros, Kota Parepare, Kabupaten Tana Toraja (Sulawesi Selatan), Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Kupang (Nusa Tenggara Timur), Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Kota Ambon (Maluku). Program INKLUSI-BaKTI, akan fokus pada perubahan kebijakan dan penguatan kelembagaan untuk memberi akses layanan kepada kelompok minoritas, marginal, dan rentan sebagai warga negara dan sebagai manusia.

Program INKLUSI-BaKTI bekerja dengan eksekutif, khususnya OPD (Organisasi Perangkat

Daerah) terkait melalui perbaikan dan penguatan layanan yang memudahkan akses bagi kelompok minoritas, marginal, dan rentan. Dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) untuk perubahan kebijakan yang responsif gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Program juga menguatkan komunitas di tingkat desa/kelurahan yang disebut sebagai Kelompok Konstituen (KK) untuk mendorong keberdayaan masyarakat. Sementara dengan media massa, agar menjadi mitra yang melakukan perubahan perspektif sekaligus kontrol bagi pelaksanaan layanan dan kebijakan yang inklusif.

Program INKLUSI-BaKTI didesain untuk berkontribusi pada perubahan dan transformasi sosial menuju masyarakat inklusif, suatu cita-cita yang sangat luhur dan manusiawi. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang terbuka dan melibatkan semua strata dan golongan, semua komunitas dan kelompok tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang apa pun, dalam mengakses layanan publik dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pembangunan.

Di dunia mana pun, selalu ada komunitas dan kelompok minoritas, marginal, dan rentan. Namun, komunitas tersebut bukanlah sesuatu yang diturunkan dari langit, tetapi dibentuk dan terbentuk oleh berbagai faktor. Sama dengan perilaku diskriminatif kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, marginal, dan rentan adalah sesuatu terbentuk secara budaya dan sosial. Karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab semua umat manusia untuk mengubah struktur kehidupan menjadi lebih inklusif, yang memberi akses, ruang dan partisipasi bagi kelompok minoritas, menarik kelompok marginal ke dalam lingkaran kebersamaan, serta mengurangi dan mencegah kerentanan kelompok tersebut.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program INKLUSI-Yayasan BaKTI dapat menghubungi info@bakti.or.id

BAGAIMANA INDONESIA DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN & UNIVERSALISASI AKSES INTERNET?

Oleh

TIM PENELITI BANK DUNIA

Ekonomi digital yang berfungsi dengan baik membutuhkan akses internet yang luas dan berkualitas tinggi. Meskipun penggunaan internet di Indonesia telah meningkat hampir empat kali lipat dalam dekade terakhir, setengah dari populasi orang dewasa Indonesia masih belum dapat mengakses internet.

Selain itu, hampir semua pengguna internet di Indonesia mengakses melalui perangkat seluler. Meskipun internet seluler (3G atau 4G/LTE) menjadi layanan yang paling banyak digunakan di Indonesia, masih tidak setara dengan internet kabel, baik dalam hal kapasitas, kualitas layanan, kinerja *bandwidth* tinggi, dan efisiensi biaya. Upaya pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19 baru-baru ini, menyoroti keterbatasan internet seluler di mana jutaan siswa dan guru di seluruh Indonesia merasa bahwa paket data seluler mereka tidak memadai dan sangat mahal untuk aplikasi *bandwidth* tinggi.

Akses terbatas ke internet berkualitas tinggi seperti ini menghambat masyarakat dalam menggali kemampuan produktifnya untuk memetik manfaat ekonomi digital sepenuhnya. Hal ini memberikan dua tantangan utama, yaitu bagaimana membuat akses internet kabel menjadi universal dan meningkatkan kualitas internet.



Foto: Adwit B. Pramono/Yayasan BaKTI

Meningkatkan cakupan jaringan serat optik adalah solusi yang penting, namun tidak cukup. Di saat investasi oleh penyedia layanan swasta, bersama dengan proyek-proyek pemerintah seperti Palapa Ring¹, terus meningkatkan konektivitas dan ketersediaan layanan di seluruh kabupaten di Indonesia, ternyata jumlah pelanggan internet tidak meningkat secara paralel. Hanya 26% rumah yang memiliki akses ke penyedia internet kabel yang berlangganan layanan ini.

Rendahnya tingkat berlangganan sebagian besar disebabkan oleh masalah biaya dan kualitas. Harga paket data seluler Indonesia relatif terjangkau dibandingkan dengan paket serupa di negara tetangga, namun hal ini tidak berlaku pada paket internet kabel. Dalam peringkat ITU 2019 untuk biaya berlangganan internet kabel, Indonesia berada di peringkat 131 dari 200 negara dan wilayah yang diamati dalam hal keterjangkauan biaya. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah salah satu pasar internet kabel yang paling mahal. Hampir

separuh rumah tangga Indonesia (44%) menyebut biaya tinggi sebagai alasan utama mereka tidak berlangganan layanan internet kabel.

Selain biaya yang mahal, kualitas layanan internet di Indonesia termasuk yang terendah dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN. Indonesia mencatat kecepatan *download* internet seluler paling lambat kedua (17,24 Mbps), sedikit di atas Kamboja (16,4 Mbps). Untuk kecepatan internet kabel, Indonesia paling lambat ketiga di ASEAN, setelah Kamboja dan Myanmar.

Apa Penyebab Internet di Indonesia Relatif Mahal dan Lambat?

Dua faktor utama yang menyebabkan mahalnya harga dan rendahnya kualitas konektivitas internet Indonesia. Pertama, pemakaian bersama infrastruktur, di mana ini adalah praktik umum di antara jaringan internet seluler, namun tidak lazim di pasar jaringan internet kabel. Antara 70 persen hingga

80 persen dari biaya untuk internet kabel biasanya disebabkan oleh infrastruktur pasif, seperti pipa, tiang, hak jalan, dan pekerjaan sipil. Pembebanan bersama biaya di antara penyedia layanan akan membawa manfaat, pengeluaran yang lebih rendah untuk akuisisi, *leasing*, dan pemeliharaan.

Kedua, skema lisensi yang restriktif membuat penyedia layanan menawar untuk lisensi layanan khusus, ketimbang menyediakan lisensi tunggal untuk semua layanan. Hal ini mengurangi daya saing di pasar internet dengan membatasi masuknya pemain baru, menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen untuk layanan berkualitas lebih rendah, sehingga menghambat adopsi internet.

Pasar internet seluler lebih kompetitif dibanding internet kabel yang terkonsentrasi, dengan Telkom mendominasi pangsa pasar.

Untuk mengatasi hambatan regulasi ini, Indonesia dapat mempertimbangkan dua langkah kebijakan seperti yang disarankan dalam laporan *Beyond Unicorn* Bank Dunia. Pertama, pemerintah dapat mendorong pemakaian bersama infrastruktur, baik secara aktif maupun pasif. Aturan yang baru-baru ini diberlakukan menjadi awal yang baik untuk menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemakaian bersama infrastruktur pasif. Tindak lanjut penegakan hukum akan berperan penting. Selain itu, pengaturan pemakaian bersama infrastruktur pasif dan penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif harus menjadi tanggung jawab sebuah lembaga. Terakhir, melalui kemitraan pemerintah dan swasta dapat mempercepat investasi dalam konektivitas internet. Misalnya, untuk penyebaran serat *optic*, penyedia layanan internet dapat bekerja sama dengan penyedia layanan publik untuk menggunakan tiang telekomunikasi dan saluran bawah tanah yang sudah tersedia.

Kedua, Indonesia harus memperkuat persaingan di sepanjang rantai nilai *broadband* dengan menyederhanakan proses perizinan untuk mendorong masuknya pemain baru dan pengembangan produk yang lebih maju. Konsumen juga harus diberikan kemungkinan untuk beralih di antara penyedia layanan dengan memungkinkan transfer nomor telepon antar penyedia layanan.

Anda mempunyai pendapat lainnya tentang bagaimana meningkatkan akses dan kualitas internet di Indonesia?

Artikel ini adalah bagian dari serangkaian blog yang membahas kesenjangan digital dalam konteks akses internet *broadband*, akses internet seluler, ekonomi digital, dan tata kelola digital, berdasarkan hasil laporan *Beyond Unicorn*.

¹Proyek Palapa Ring adalah kemitraan pemerintah-swasta (KPS) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan dilaksanakan selama 2015–2019, telah berhasil memperluas tulang punggung telekomunikasi domestik ke seluruh tanah air. Proyek Palapa Ring yang asli dibagi menjadi bagian yang layak secara komersial dan bagian yang tidak layak secara komersial. Bagian yang layak secara komersial (457 kabupaten/kota) dilakukan oleh pihak swasta dan mencakup rute dari Lombok ke Kupang, SMPCS (Sistem Kabel Sulawesi-Maluku-Papua) hingga Jayapura dan Merauke, dan beberapa proyek kabel yang lebih kecil. Bagian Palapa Ring yang tidak layak secara komersial (57 distrik) dibiayai melalui Dana Kewajiban Layanan Universal (KPU/USO) (dibiayai oleh retribusi atas pendapatan bersih perusahaan telekomunikasi) dan juga dilaksanakan pada 2015–2019.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Para penulis:

Putu Sanjiwacika Wibisana - Consultant, World Bank Poverty and Equity team, Indonesia, **Utz Pape** - Senior Economist, Poverty and Equity Global Practice, **Sailesh Tiwari's** - Senior Economist
Natasha Beschorner - Senior Digital Development Specialist

Artikel ini bersumber dari:

<https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/bagaimana-indonesia-dapat-meningkatkan-kualitas-layanan-dan-universalisasi-akses>

TONGGAK BARU PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Oleh **LUSIA PALULUNGAN**

Pencegahan perkawinan anak yang telah dicanangkan Pemerintah Indonesia sejak Februari 2020, menjadi tonggak awal untuk merespons situasi dan kondisi perkawinan anak di Indonesia. Sejak saat itu, berbagai pihak utamanya pemerintah melalui sektor terkait terus mengkampanyekan dan melakukan berbagai upaya pencegahan perkawinan anak.



Ilustrasi: Ichsan Djunaed/Yayasan BaKTI

Salah satu upaya yang dilakukan adalah penelitian dan pengkajian mengenai penyebab dan dampak terjadinya perkawinan anak. Dari sejumlah penelitian dan pengkajian tersebut, salah satu penyebab utamanya adalah ketiadaan sanksi bagi pihak yang berperan di dalam perkawinan anak, baik orang tua, wali, anggota keluarga dan aparat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam administrasi.

Meskipun di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Namun pada kenyataannya, masih banyak orang tua yang tidak menjalankan peran tersebut. Salah satunya disebabkan karena memang tidak ada sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat terjadinya perkawinan usia anak.

Baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, tidak tertera sanksi jika terjadi pernikahan di bawah umur ini. Anak dan sekaligus orang tua yang jelas-jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak wajib mencegah terjadinya perkawinan, tidak dibebankan apa-apa. Ditambah lagi dengan perilaku oknum pejabat pencatat akta nikah yang menaikkan atau mengontrol umur.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) maka pelaksanaan perkawinan merupakan tindak pidana dan telah diatur sanksi bagi pelaku perkawinan anak. Sanksi bagi pelaku dikategorikan atas:

1 Sanksi Pidana Pokok yaitu sanksi pidana penjara

- 2 Sanksi Pidana Denda
- 3 Sanksi Pidana Pemberatan (ditambah 1/3 dari pidana pokok)
- 4 Pembayaran Restitusi sebagai hak korban
- 5 Pidana tambahan
- 6 Pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pidana Pokok, Denda dan Pemberatan

Terkait dengan sanksi pidana penjara, pidana denda dan pidana pemberatan diatur di dalam beberapa pasal yaitu Pasal 10 dan Pasal 15.

Pelanggaran atas perkawinan anak melanggar Pasal 10 mengenai Pemaksaan Perkawinan:

- 1 Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2 Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. perkawinan anak;
 - b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
 - c. pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Pemidanaan terhadap pelaku perkawinan anak ini, menjerat orang yang menikahi orang

usia anak atau yang belum berusia 19 tahun berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Juga menjerat siapa pun yang melakukan atau membiarkan terjadinya pemaksaan perkawinan dengan pidana penjara dan/atau pidana denda.

Sanksi pidana tidak hanya itu, tetapi di dalam UU TPKS juga mengatur mengenai pemberatan sanksi pidana penjara yang diatur di dalam pasal 15 (1), yang bunyinya:

1 Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

- a. dilakukan dalam lingkup keluarga;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. dilakukan terhadap anak;
- h. dilakukan terhadap penyandang disabilitas;
- i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
- j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;

- l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- m. mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/atau
- o. mengakibatkan korban meninggal dunia.

“

Meskipun di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Namun pada kenyataannya, masih banyak orang tua yang tidak menjalankan peran tersebut.

”



Ilustrasi: Ichsan Djunaed/Vayasan BaKTI

Restitusi (Hak Korban)

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.

Pembayaran ganti kerugian ini, dibebankan kepada pelaku yang diatur di dalam Pasal 16:

- 1 Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan undang-undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Pemberian Restitusi kepada korban diatur di dalam Pasal 30:

- 1 Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.
- 2 Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Pidana Tambahan

Selain pidana penjara, pidana denda dan pidana pemberatan, di dalam Pasal 16 juga mengatur mengenai pidana tambahan, yaitu:

- 1 Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat

Menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan;
- b. pengumuman identitas pelaku; dan/atau
- c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual.

- 2 Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.

- 3 Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

Tindak Pidana Lain

Undang-undang ini juga menetapkan mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 19: Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Berbagai pengaturan mengenai sanksi pidana di dalam Undang-Undang TPKS, diharapkan menjadi momentum untuk pencegahan perkawinan anak yang selama ini tidak dapat dicegah karena tidak adanya sanksi yang tegas. Semoga Undang-Undang TPKS ini dapat mencegah perkawinan anak secara signifikan, tentu saja melalui penegakan hukum dan implementasi yang konsisten dan berkelanjutan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Manajer Program INKLUSI - Yayasan BaKTI dan dapat dihubungi melalui lpalulungan@bakti.or.id



Foto: Mila Shwaiko/Yayasan BaKTI

PEKERJA ANAK DI PERKEBUNAN TEBAKAU RAKYAT

Bagian I

Oleh **TIM PENELITI SMERU**

M

enurut ILO, di seluruh dunia terdapat setidaknya 168 juta anak yang menjadi pekerja anak, dan 85 juta di antaranya melakukan pekerjaan berbahaya. Menjadi pekerja anak akan memengaruhi kesehatan fisiologis dan psikologis anak tersebut, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jumlah pekerja anak paling banyak terdapat di sektor pertanian; 98 juta anak bekerja dalam sektor ini (atau 59% dari jumlah pekerja anak di seluruh dunia).

Pekerja anak merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi banyak faktor, termasuk kemiskinan. Di Indonesia, 4 juta anak yang berusia 5–17 tahun teridentifikasi

sebagai pekerja anak, dan 58% pekerja anak yang berusia 7–14 tahun bekerja di sektor pertanian. Pekerja anak di perkebunan tembakau menjadi perhatian khusus karena anak-anak ini terpapar bahaya biologis seperti pestisida dan nikotin yang ada pada daun tembakau.

Konvensi ILO No. 138 (1973) dan No. 182 (1999) menetapkan standar hukum internasional untuk usia minimum pekerja dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Di sektor tembakau, ECLT (*Eliminating Child Labour in Tobacco growing*) Foundation didirikan untuk memulai program-program penghapusan pekerja anak di perkebunan tembakau. Perusahaan-perusahaan tembakau multinasional juga menerapkan program *Sustainable Tobacco Production/STP* (produksi tembakau berkelanjutan) yang antara lain, menerapkan panduan untuk memastikan bahwa perkebunan tembakau bebas dari pekerja anak. Indonesia telah menetapkan peraturan nasional dan sebuah program untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang diharapkan tercapai pada 2022 melalui peningkatan kapasitas dan pengawasan yang lebih ketat di tempat-tempat kerja. Namun, tidak banyak informasi yang diketahui mengenai situasi anak di komunitas-komunitas petani tembakau. Hal ini menyulitkan upaya untuk menciptakan program intervensi yang tepat sasaran.

Dalam upaya untuk memahami situasi pekerja anak di perkebunan tembakau, akar penyebab adanya pekerja anak di perkebunan tembakau, dan kemungkinan solusi untuk mengatasi masalah ini, ECLT Foundation meminta The SMERU Research Institute untuk melakukan studi diagnostik mengenai pekerja anak di wilayah perdesaan dengan penekanan pada perkebunan tembakau rakyat. Studi ini menggunakan dua definisi pekerja anak, yaitu definisi dari ILO dan definisi dari Undang-Undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui metode survei, sementara pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), diskusi kelompok, dan foto bercerita. Studi ini dilakukan di lima desa di Lombok Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat) dan lima desa di Jember (Provinsi Jawa Timur). Daerah-daerah ini dipilih karena termasuk penghasil utama tembakau di Indonesia. Pemilihan kabupaten dan desa sampel dilakukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan konsultasi dengan pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan 100 rumah tangga yang dipilih secara acak dari masing-masing desa. Tahap penjajakan dilakukan pada Agustus 2016, survei pada Oktober 2016, dan penelitian lapangan pada sekitar Desember 2016 hingga Januari 2017.

Pekerja Anak pada Umumnya

Orang tua dan masyarakat pada umumnya tidak mengetahui perbedaan antara anak yang bekerja dan pekerja anak. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konsep pekerja anak tercermin pada tingginya prevalensi pekerja anak di kedua kabupaten, yaitu 14,31% di Jember dan 28,33% di Lombok Timur (dihitung berdasarkan definisi ILO).

Isu pekerja anak makin memprihatinkan dengan adanya fakta mengenai kurangnya pemahaman masyarakat tentang berbagai kondisi kerja yang berbahaya bagi anak. Dalam studi ini, mayoritas anak yang bekerja diklasifikasikan sebagai pekerja anak, terutama karena sifat pekerjaannya. Di Lombok Timur, dari 187 pekerja anak, ada 167 anak (atau 25,3% dari seluruh populasi anak di desa-desa studi) yang terpapar pekerjaan berbahaya. Sementara itu, di Jember, 80 dari 95 pekerja anak (atau 12,05% dari seluruh populasi anak di desa-desa studi) terpapar pekerjaan berbahaya.

Prevalensi pekerja anak tertinggi berasal dari kelompok umur 15–17 tahun (berdasarkan definisi ILO), dengan angka 49,46% di Lombok Timur dan 25,64% di Jember; dan pada kelompok umur 16–17 tahun (berdasarkan definisi UU Ketenagakerjaan), dengan angka 55% di Lombok Timur dan 25% di Jember. Temuan ini sesuai dengan studi kualitatif yang menemukan tingginya kecenderungan migrasi orang dewasa dari desa-desa studi. Kecenderungan ini kemudian mendorong peningkatan permintaan akan tenaga kerja anak. Anak pada kelompok-kelompok umur tersebut sering kali tidak lagi dianggap anak-anak oleh masyarakat dan diberi tugas berat seperti mengangkut tumpukan daun tembakau dari sawah ke tempat pengeringan.

Mayoritas pekerja anak bekerja di sektor pertanian, dengan angka 66,32% di Jember dan 85,03% di Lombok Timur. Sementara itu, pekerja anak lainnya tersebar di sektor-sektor nonpertanian (perdagangan, konstruksi, jasa, dan lain-lain), yaitu 33,68% di Jember dan 14,97% di Lombok Timur. Karena tembakau merupakan tanaman sumber penghasilan utama di desa-desa studi, maka prevalensi tertinggi pekerja anak di sektor pertanian adalah di perkebunan tembakau.

Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau

Mayoritas pekerja anak berasal dari rumah tangga buruh tani, dengan angka 43,14% di Jember dan 41,3% di Lombok Timur. Namun, di antara rumah tangga petani tembakau, status petani sebagai petani kontrak atau non kontrak dan apakah petani tersebut memiliki atau menyewa lahan ternyata tidak mengurangi peluang seorang anak untuk menjadi pekerja anak. Di antara populasi rumah tangga pemilik lahan tembakau, hanya sebagian kecil yang merupakan petani kontrak, yaitu 3,3% di Lombok Timur dan 5,88% di Jember.

Beberapa variabel yang secara signifikan dan konsisten menjadi prediktor dari anak-anak yang bekerja di perkebunan tembakau adalah usia, pekerjaan kepala rumah tangga, dan proporsi pekerja anak per dusun. Anak-anak yang lebih tua lebih besar peluangnya untuk terlibat dalam pekerjaan tembakau. Selain itu, pekerjaan orang tua sebagai buruh tani meningkatkan sebesar 28% peluang anak untuk bekerja di perkebunan tembakau. Studi ini juga menemukan bahwa tingginya proporsi pekerja anak di sektor tembakau per dusun secara signifikan meningkatkan peluang anak untuk bekerja di perkebunan tembakau sebesar 33%.

Mayoritas anak di desa-desa studi terlibat dalam pekerjaan pascapanen, khususnya mengelantang atau mengikat daun tembakau (58% dari seluruh pekerja anak di sektor tembakau di Lombok Timur) dan nyujen atau memasukkan daun tembakau ke ikatan benang (47% dari seluruh pekerja anak di sektor tembakau di Jember). Sebagian kecil pekerja anak juga terlibat dalam tahap-tahap pengolahan lainnya seperti pengeringan daun tembakau.

Anak yang lebih tua dan anak laki-laki rata-rata bekerja dalam jam-jam yang lebih panjang, dibandingkan dengan anak-anak yang lebih muda dan perempuan. Pada mereka yang berusia 13–14 tahun, rata-rata jumlah jam kerjanya adalah 3–6 jam per minggu, sementara pada mereka yang berusia 15–17 tahun, khususnya anak laki-laki, rata-rata jumlah jam kerjanya mencapai 12 jam per minggu. Ada juga anak-anak yang jam kerjanya melebihi batas yang diizinkan untuk usia mereka. Dari semua pekerja anak berusia 13–14 tahun, masing-masing 18% di Lombok Timur dan 33% di Jember bekerja selama 15 hingga 84 jam per minggu. Sementara itu, dari semua pekerja anak berusia 15–17 tahun, masing-masing 8% di Lombok Timur dan 14% di Jember bekerja

lebih dari 40 jam dan bekerja hingga 84 jam per minggu.

Kontribusi upah pekerja anak terhadap pendapatan rumah tangga per kapita lebih tinggi pada anak-anak di Lombok Timur daripada anak-anak di Jember (14,2% berbanding 8,9%). Dalam menghitung angka ini, pendapatan anak-anak dibobotkan dengan menggunakan probabilitas anak-anak yang bekerja di sektor tembakau setiap bulan selama setahun terakhir. Kontribusi anak terhadap pendapatan rumah tangganya bergantung pada kondisi ekonomi keluarga. Anak-anak dari keluarga miskin menyumbangkan pendapatan mereka untuk membeli bahan kebutuhan pokok (beras, makanan, minyak goreng, dan lain-lain), barang kebutuhan sekolah, dan uang saku. Sementara itu, anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi lebih tinggi biasanya bekerja untuk menghemat biaya tenaga kerja (sehingga orang tua mereka tidak perlu membayar orang lain). Anak-anak juga menyampaikan bahwa mereka menggunakan penghasilan mereka untuk kebutuhan pribadi seperti membeli pulsa telepon, telepon genggam, sepeda motor bekas, dan barang-barang keperluan pribadi.

Jenis alat pelindung diri (APD) yang digunakan anak-anak cenderung sangat terbatas. Di kedua kabupaten ini, lebih dari 75% pekerja anak tidak menggunakan perlengkapan keselamatan dan tidak mendapatkan pendidikan mengenai keselamatan kerja saat bekerja di perkebunan tembakau. Dari semua anak yang menyatakan menggunakan APD, mayoritas menyebutkan menggunakan pelindung kepala (sekitar 20%, yaitu topi) dan pelindung pernapasan (sekitar 10%, yaitu masker wajah).

Pekerja anak dan orang dewasa memandang bahwa sebagian besar pekerjaan di perkebunan tembakau adalah pekerjaan ringan dan tidak berbahaya, asalkan mereka

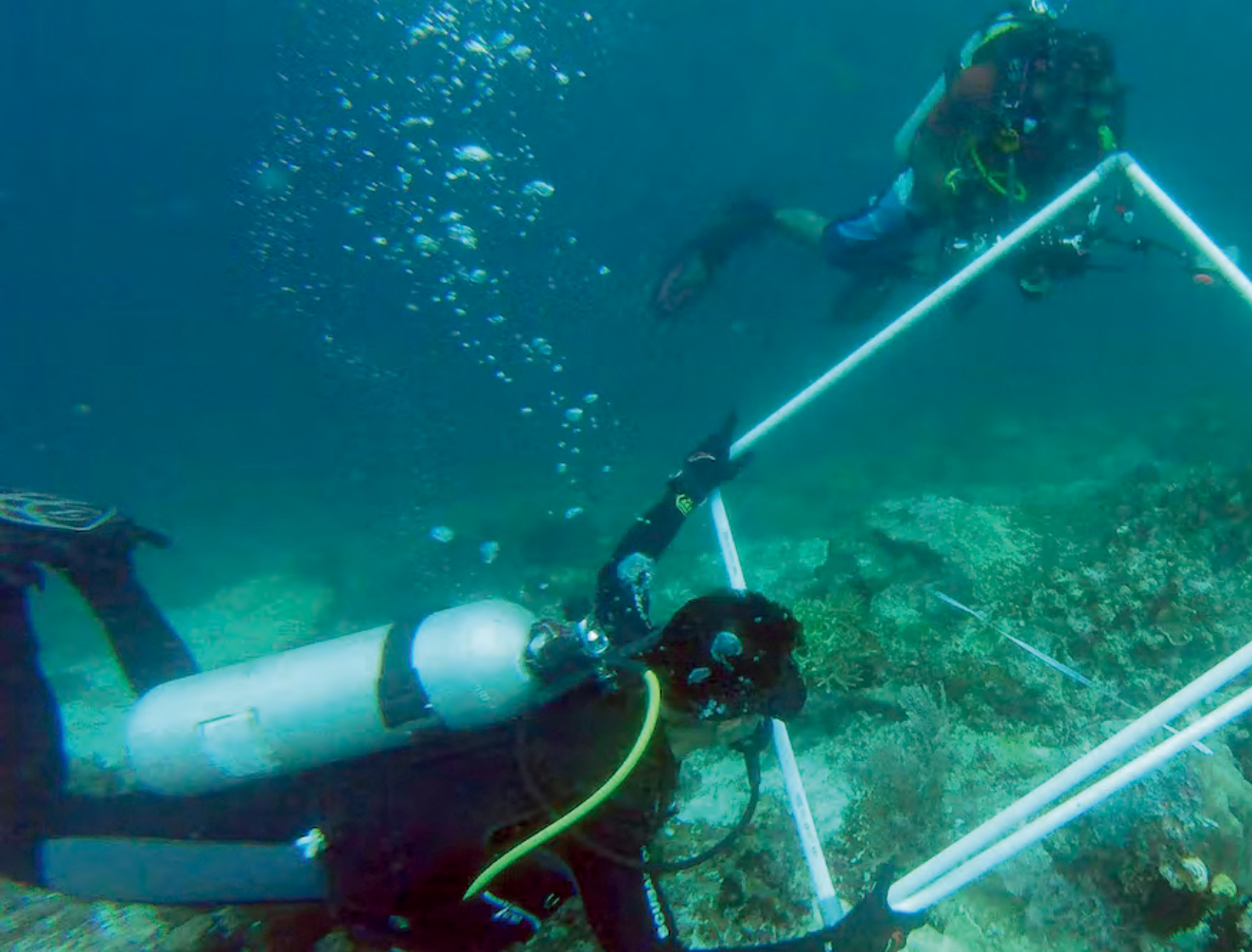
tidak mengalami dampak negatif langsung terhadap kesehatan mereka. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai bahaya yang mengancam pekerja anak di perkebunan tembakau. Sementara sejumlah orang dewasa, terutama pejabat desa dan petani kontrak, dapat mengidentifikasi potensi bahaya umum seperti kondisi terpapar pupuk dan pestisida serta bahaya bekerja di ketinggian, banyak orang dewasa tidak menyadari bahaya daun tembakau segar (atau sering disebut “daun tembakau basah”). Kenyataannya, pemahaman umum di masyarakat adalah bahwa bahaya daun tembakau ada di daun tembakau yang sudah dikeringkan karena baunya yang menyengat dan menyebabkan sesak napas atau gangguan pernapasan.

Banyak orang di desa-desa studi tidak mengetahui bahaya yang berasal dari daun tembakau segar karena sosialisasi mengenai *green tobacco sickness* (GTS) hanya diberikan terbatas kepada pelajar dari sekolah dasar tertentu melalui *After School Programme*/ASP (program setelah jam belajar sekolah) dan kepada petani kontrak. Oleh karena itu, anggota rumah tangga buruh tani dan petani non kontrak tidak mengetahui penyakit yang bisa diakibatkan oleh daun tembakau segar. Selain itu, petugas kesehatan di lokasi studi juga mengakui bahwa mereka belum pernah mendapat informasi terkait GTS. Perhatian mereka lebih terfokus pada bahaya pupuk dan pestisida serta risiko bahaya dari aktivitas menggantung dan menurunkan muatan tembakau dari dalam oven pengering.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari Draf Laporan Penelitian SMERU berjudul **Studi Diagnostik Pekerja Anak di Wilayah Perdesaan** (dengan Penekanan Khusus pada Perkebunan Tembakau Rakyat) Dengan tautan: <https://smeru.or.id/id/publication-id/studi-diagnostik-pekerja-anak-di-wilayah-perdesaan-dengan-penekanan-khusus-pada>

Penulis: **Emmy Hermanus, Stella Aleida Hutagalung, Rezanti Putri Pramana, Fatin Nuha Astini, Elza Elmira, Veto Tyas Indrio Widjajanti Isdijoso.**



KETIMPANGAN RISET LINGKUNGAN DI INDONESIA TIMUR YANG PERLU SEGERA DIATASI

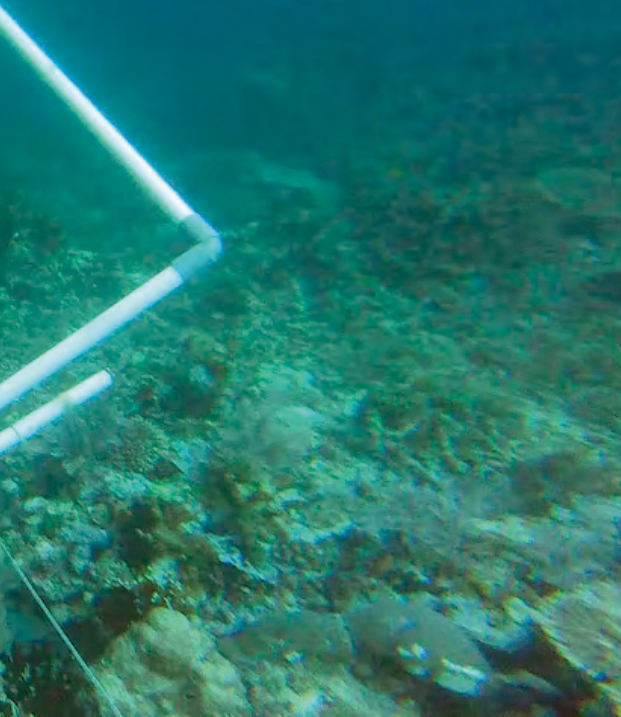
Oleh **ROBBY IRFANY MAQOMA**

Menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni, kami merangkum analisis-analisis dari para pakar yang terbit di *The Conversation* seputar ketimpangan penelitian bertema lingkungan hidup di kawasan Indonesiatimur.

Topik ini dipilih karena kawasan Indonesia timur yang membentang dari Papua, kepulauan Maluku, Halmahera, sebagian Sulawesi, hingga Nusa Tenggara, kerap disebut sebagai surga ekosistem dunia.

Misalnya, hutan Papua merupakan salah satu hutan alam terluas di dunia, termasuk juga rawa-rawa yang menyimpan begitu banyak karbon. Ini belum terhitung kawasan laut dan pesisir yang memuat ekosistem karang, mangrove, dan padang lamun. Lanskap ini memperkaya biodiversitas flora dan fauna di kawasan tersebut.

Tim peneliti mendata kerusakan karang yang disebabkan kandasnya Kapal MV Caledonian Sky berbendera Bahama di perairan Raja Ampat, Papua Barat.
Foto: **Pemkab Raja Ampat/Antara**



Namun, kondisi ini terancam karena aktivitas manusia. Misalnya, ekspansi perkebunan, perikanan yang tak bertanggung jawab, hingga pencemaran sampah maupun karena perubahan iklim yang menambah tekanan bagi ekosistem di belahan timur Indonesia.

Guna mengatasi berbagai persoalan tersebut, Indonesia membutuhkan langkah yang berbasis bukti ilmiah agar kebijakannya tepat sasaran. Sayangnya, riset yang dilakukan di kawasan Indonesia timur ini masih sangat terbatas-jauh berbeda dengan penelitian di kawasan Indonesia barat.

Sampah Plastik

Peneliti sektor kelautan dari Universitas Padjadjaran, Noir Primadona Purba, bersama tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, Universitas Maritim Raja Ali Haji di Kepulauan Riau, dan *Mantawatch International*

– organisasi nirlaba yang berbasis di London, melakukan tinjauan sistematis riset-riset yang dipublikasi di *Marine Pollution Journal* selama 1986-2018.

Hasilnya, sebagian besar publikasi meneliti sampah plastik di lautan sekitar Jawa dan Bali. Hanya ada lima publikasi seputar hal tersebut. Dua di antaranya pun sudah berumur lebih dari dua dekade.

Sekitar 80% dari penelitian dilakukan di daerah pesisir pantai dan ekosistem laut, sementara 20% lainnya meneliti kolom air. Sebagian besar dari penelitian ini berfokus pada ilmu lingkungan dan manajemen sumber daya alam.

Hanya sedikit penelitian yang fokus pada kesehatan, sosio-ekonomi, teknik, atau kebijakan. Sangat sulit untuk menemukan penelitian yang mempelajari dampak sampah plastik pada manusia. Tim hanya menemukan beberapa makalah penelitian tentang limbah plastik di dalam perut ikan.

Hal ini sangat disayangkan karena keterbatasan penelitian membuat kita tidak tahu banyak bagaimana limbah plastik berdampak pada kehidupan laut di perairan Indonesia, khususnya di Indonesia timur.

Penelitian tentang dampak sampah laut bagi ekosistem perairan juga sangat penting sebagai bahan untuk membuat kebijakan dan aturan perusahaan, pemangku kepentingan, dan pemerintah akan urgensi untuk membebaskan laut dari sampah plastik dan turunannya.

Konservasi Satwa

Analisis selanjutnya berasal dari kandidat doktor dari University of Kent, Ardiantiono. Bersama rekannya, Irene Margareth Romaria Pinondang, Ardian mengulas lebih dari 300 publikasi ilmiah dengan topik populasi kelompok mamalia darat berukuran sedang dan besar (berat badan >1 kg), mulai dari musang hingga gajah.



Landak semut spesies *Achyrocline saturei*
Foto: [Flickr.com/Patrick Kavanagh](https://www.flickr.com/photos/patrickkavanagh/)

Hasilnya (yang belum dipublikasi karena masih dalam tahap penulisan), mereka mendapati sebagian besar publikasi satwa di Indonesia mengulas spesies di kawasan Indonesia bagian barat.

Informasi populasi mamalia yang berada di bagian tengah dan timur Indonesia masih terbatas. Misalnya, tidak ada satupun publikasi mengenai populasi tiga spesies landak semut atau ekidna: *Tachyglossus aculeatus*, *Zaglossus attenboroughi*, dan *Zaglossus bartoni*. Padahal, sebagian spesies ini merupakan satwa endemik pulau Papua.

Contoh lainnya adalah Kuskus Talaud, satwa asli Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, yang berstatus kritis. Satwa ini hanya tercatat di satu publikasi yang memuat informasi kepadatan dan sebarannya.

Pemerintah semestinya dapat memperkuat upaya konservasi dengan data satwa yang memadai di seluruh kawasan. Kerja sama perlu dibangun lebih erat dengan akademisi, pegiat konservasi, dan masyarakat setempat untuk memperkuat basis data satwa di Indonesia.

Riset ini diperlukan untuk mengetahui apa saja ancaman bagi populasi satwa di tanah air, ataupun melihat satwa yang paling terancam.

Data yang kuat juga dibutuhkan agar upaya konservasi tepat sasaran, demi memperlambat dan menghentikan laju kepunahan satwa.

Spesies Tumbuhan di Wallacea

Bukan hanya soal satwa, kesenjangan juga terjadi dalam penelitian seputar tumbuhan di kawasan Indonesia timur, khususnya di Wallacea. Hal ini disinggung dalam analisis dari pakar biologi konservasi asal Universitas Indonesia, Jatna Supriatna.

Wallacea adalah zona transisi antara daerah biogeografis Indo-Malaya Raya and Australasia. Jutaan tahun berada dalam relatif isolasi menghasilkan fauna endemik yang luar biasa untuk berkembang di sini.

Kawasan ini mencakup Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, berbagai pulau kecil dan sedang di timur Sulawesi dan pulau-pulau “Busur Banda”, serta pulau-pulau Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, di selatan Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

Nah, Jatna menyatakan bahwa tanaman di kawasan Wallacea tidak begitu dikenal seperti tetangga-tetangganya. Spesimen botani yang



Pohon Leda (*Eucalyptus deglupta*) di kawasan Hutan Lindung Wakonti, Baubau, Sulawesi Tenggara.

Foto: **Jojon/Antara**

dikumpulkan di daerah ini lebih sedikit dibandingkan pulau-pulau besar lain di Indonesia.

Padahal, kawasan ini terancam karena hutan-hutan dibabat untuk pertanian, hutan produksi kayu, dan skema pemindahan penduduk yang menempatkan ratusan ribu orang dari daerah padat penduduk Jawa ke pulau-pulau lain yang tidak begitu padat (dan kurang produktif).

Ini semua telah mengurangi habitat hutan, terutama di dataran rendah, dan mengakibatkan penurunan populasi spesies hutan secara dramatis dan parah (beberapa spesies penurunannya sampai 90%).

Bakteri Laut Indonesia Timur

Meski mengklaim sebagai negeri maritim, Indonesia belum banyak melakukan penelitian di laut Indonesia timur, khususnya laut Banda-laut dalam yang menjorok hingga 7 km ke dasar laut.

Kepada *The Conversation*-dalam *podcast* Sains Sekitar Kita-peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Yosmina Tapilatu menyayangkan hal

tersebut. Berbasiskan risetnya yang dipublikasi pada 2018, Yosmina menuturkan sejak tujuh dekade silam, hanya ada delapan publikasi yang menyorot bakteri laut di Laut Banda dan Teluk Ambon.

Ini berbanding terbalik dengan riset topik serupa di perairan Indonesia lainnya, mencapai 27 artikel sejak 1970. Itu membuktikan bahwa eksplorasi bakteri laut di kawasan Indonesia timur belum ada apa-apanya dibandingkan dengan bagian barat.

Padahal, pengetahuan tentang bakteri laut juga penting untuk mengetahui dinamika di perairan, serta cara terbaik untuk upaya pelestariannya. Bakteri laut juga berpotensi besar untuk dimanfaatkan bagi industri mulai dari sektor pakan, pangan, hingga farmasi.

Guna mengatasi ketimpangan tersebut, Yosmiana mengatakan para akademisi perlu dukungan negara. Mereka membutuhkan kapal riset, laboratorium mikrobiologi, tenaga peneliti, dan tentu saja dana riset yang besar.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Editor Lingkungan *The Conversation* Indonesia

Artikel ini bersumber dari:

<https://theconversation.com/4-analisis-soal-ketimpangan-riset-lingkungan-di-indonesia-timur-yang-perlu-segera-diatasi-184338>

PROBLEM PEREMPUAN PENJAGA HUTAN

AKSES MINIM HINGGA KESENJANGAN

Oleh **TABAYYUN PASINRINGI**

Perempuan masih sulit mengakses hutan sebab stereotip gender yang kental di desa, meskipun program Perhutanan Sosial mendorong kebijakan yang adil gender.

Bagi perempuan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, menenun sutra bukan sekadar identitas kebudayaan, tapi sumber ekonomi utama. Bahkan di masa lampau kemampuan mereka untuk menenun sutra dengan warna cerah dan motif garis vertikal maupun horizontal, jadi parameter kelayakan seseorang untuk menikah.

Tak hanya dari proses pembuatan kain sutra saja, pemasaran kain untuk dijual, juga menjadi lahan yang didominasi perempuan. Meski demikian, di sektor budidaya ulat sutra hingga mengolah lahan daun murbei, semua dilakukan lelaki.

Sukma Taroniarta dan Nurul Huda Yahya dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi Selatan menyatakan, pengolahan daun murbei, budidaya ulat sutra, hingga hasil kain sutra termasuk produk turunan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Seluruh proses produksi tersebut termasuk dalam program Perhutanan Sosial dari pemerintah, guna memberi akses kelola atas wilayah hutan kepada masyarakat sekitar agar lebih sejahtera.

Sukma mengatakan, mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan kesempatan

yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh akses kelola hutan.

“Ada 168 kelompok petani hutan di Sulawesi Selatan yang memperoleh akses Kelola Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan rasio 53,98% anggotanya perempuan. Selain itu ada dua KUPS yang dipimpin perempuan,” ujar Sukma dalam peluncuran Jurnal Perempuan Edisi 111, bertajuk “Pendidikan Publik 111: Perempuan dan Perhutanan Sosial”, (30/5).

Akan tetapi, Sukma dalam penelitian berjudul Perempuan Pejuang Sutra di Kabupaten Wajo: Aktor Tunggal dan Tantangan Akses Program Perhutanan Sosial yang diterbitkan Jurnal Perempuan menemukan, beberapa tahun terakhir, ada pergeseran peran yang membuat perempuan melakukan seluruh proses produksi sutra. Akibatnya, perempuan tersebut mengalami beban kerja yang berlipat-lipat.

Beban kerja ini terkait dengan alih fungsi lahan murbei dengan kebun jagung lantaran lebih komersil. Daun murbei pun ditanaman di pekarangan rumah atau pinggir kebun. Perawatan daun murbei dan budidaya ulat sutra lalu dilimpahkan kepada perempuan sebab dinilai tak memerlukan waktu banyak untuk dikerjakan.

“Diversifikasi lahan dinilai sebagai tindakan ekonomi yang rasional dan lumrah. (Tetapi) mengubah struktur nafkah rumah tangga. Pergeseran berdampak pada perempuan menjadi aktor tunggal dalam usaha sutra,” ungkapnya.

Perhutanan Sosial dan Ketimpangan Gender

Sukma mengatakan, meskipun ada aturan yang tidak mengecualikan perempuan, pada praktiknya, masih ada stereotip negatif yang menganggap perempuan lamban dan pemalu. Dengan demikian, ruang gerak untuk mendapatkan akses pelatihan dan pengembangan diri dalam produksi sutra dibatasi.

Ini kontras dengan nasib lelaki yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Mereka biasanya bakal diajak mengikuti beragam pelatihan pengembangan diri dalam pengolahan kain sutra, agar penjualannya dapat bersaing di era modern. Padahal kenyataannya, perempuan yang banyak bergerak di bidang tersebut.

“Ada perhitungan yang menyebutkan kualifikasi perempuan tak bisa masuk. Misalnya melek teknologi,



Foto: Adwit B. Pramono/Vayasan BaKTI



Foto: Adwit B. Pramono/Yayasan BaKTI

saat ada e-learning di kampung, mereka tak bisa akses karena bapak-bapak yang memegang teknologi, seperti ponsel,” kata Sukma.

Isu ketimpangan yang dialami perempuan penenun sutra di Wajo tersebut juga dialami perempuan yang bergelut dalam program Perhutanan Sosial di daerah lain. Misalnya, Desa Harumansari, Kabupaten Garut yang memiliki skema Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK).

Ini tercermin dari riset bertajuk Analisis Politik Agraria dalam Akses Hutan di Wilayah Perhutani Melalui Program Perhutanan Sosial oleh asisten riset Yayasan Indonesia Cerah Sartika Nur Salahati. Salah satu poin di riset itu adalah masyarakat penerima SK pengelolaan kehutanan berhak mendapatkan pengakuan yang adil atas gender. Namun ironisnya, Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang mengatur pengelolaan hingga program perhutani, masih didominasi lelaki.

“Dominasi itu menyebabkan perempuan mencari alternatif pekerjaan keluar desa, seperti menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau buruh tekstil di kota, seperti Bandung dan

Bogor. Ini memisahkan perempuan dengan kehidupannya,” kata Sartika.

Selain itu, lanjutnya, jika perempuan menjual hasil pertaniannya, maka mereka akan menerima upah yang lebih kecil daripada laki-laki. Umumnya, perempuan menerima upah sebesar 10 ribu rupiah untuk hasil kebunnya, sedangkan laki-laki menerima upah 30 ribu rupiah Sementara alokasi (waktu) kerja perempuan lebih panjang karena ketika laki-laki bekerja di kebun atau sawah banyak yang menghabiskan waktu merokok atau minum kopi.

Ketimpangan upah itu juga tak bisa lepas dari stereotip perempuan lemah dan pantas diupah kecil. Hal itu memberi pengaruh buruk pada kebutuhan ekonomi, sedangkan banyak dari perempuan petani tersebut yang menjadi pencari nafkah tunggal karena menjadi janda atau suami yang mengalami sakit bertahun-tahun.

“Penyebaran informasi terpusat dan tidak (adanya) transparansi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dalam proses bantuan menyulitkan sumber ekonomi karena ada resiko kecurangan dalam pembagian.

Sementara kalau dilihat perempuan lebih banyak terlibat dalam hampir semua proses pertanian baik itu kebun atau sawah,” jelas Sartika.

Kebijakan Belum Sensitif Gender

Menurut laporan yang dirilis Pusat Telaah dan Informasi Regional, walaupun Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tak mengecualikan perempuan sebagai subjek dalam mengelola hutan, implementasi kebijakannya belum sensitif gender. Pasalnya, pengajuan Perhutanan Sosial hanya bisa dilakukan oleh kepala keluarga. Sementara, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami adalah kepala keluarga.

Berdasarkan laporan itu, Abby Gina Boang Manalu, Direktur dan Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan juga mengatakan, walaupun Perhutanan Sosial tidak melarang perempuan secara tertulis, kebijakan belum mengakomodasi perempuan akar rumput dan pedesaan. Ketika perempuan mengajukan surat izin mengelola hutan mereka kerap diremehkan oleh pemerintah daerah maupun laki-laki. Hal itu disampaikan dalam penelitiannya Partisipasi Perempuan dalam Perhutanan Sosial: Studi Kasus di Lima Provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat.

“Di wilayah Aceh, pemerintah tak menganggap serius (surat izin untuk mengelola wilayah hutan) sebab stereotip gender dan pembagian kerja berdasarkan gender masih sangat kuat. Asumsinya kerja-kerja terkait hutan atau yang menggunakan tenaga fisik adalah bidang laki-laki,” ujarnya.

Hal senada juga terjadi di empat wilayah lain. Di Bengkulu, perempuan sulit terlibat dalam tata kelola hutan sosial karena dinilai tak memiliki kompetensi atau kecerdasan. Sedangkan di Kalimantan Barat, perempuan juga dipandang sebelah mata ketika berbicara tentang hutan dengan tingkat keterlibatan di bawah 30%.

Akan tetapi, ketika perempuan diberi ruang untuk terlibat, maka muncul perubahan yang cukup signifikan. Di Aceh, misalnya, dengan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan, mereka melakukan pendekatan dialog dan memberi pemahaman kepada pembalok liar kalau perbuatan mereka dapat dikenai sanksi hukum.

“Dari dialog itu hasilnya tidak terjadi banjir di beberapa tahun terakhir sejak perempuan terlibat dan mereka bisa mengembangkan *ecotourism* dengan tujuan pendidikan,” kata Abby.

Hana Satriyo, *Deputy Country Representative* Indonesia untuk The Asia Foundation juga bilang, “Berbagai studi menunjukkan, (saat) perempuan terlibat Perhutanan Sosial, hutan bisa dikelola lebih berkelanjutan. Ekonomi keluarga juga meningkat dan muncul kesetaraan karena ada pembagian peran. Ini bukti terstruktur soal peran perempuan.”

Dimintai pendapat soal peran perempuan, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Apik Karyana angkat suara. Dalam hematnya, Kemen LHK berkomitmen dalam pengarusutamaan gender dan mengutamakan partisipasi masyarakat.

“Harus ada tambahan akses yang diberikan kepada kelompok tani (dan) paling penting akses pendampingan yang tak lepas dari *mainstreaming* gender,” ujarnya.

Masalahnya, apakah hal itu sudah dilakukan? Menurut Abby, kendati ada intervensi di level nasional, tapi jika instansi pemerintah tingkat rendah belum punya perspektif gender yang cukup. “Karenanya, kebijakan menjadi sekadar kebijakan, dan permasalahan yang dialami perempuan untuk terlibat lebih jauh tak terjawab.”

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel bersumber dari [Magdalene.co](https://magdalene.co/story/problem-perempuan-penjaga-hutan-akses-minim-hingga-kesenjangan-upah) melalui tautan <https://magdalene.co/story/problem-perempuan-penjaga-hutan-akses-minim-hingga-kesenjangan-upah>

MENATA PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Oleh **A.M. SALLATU**

Pertumbuhan ekonomi masih merupakan hal yang niscaya bagi pembangunan nasional maupun pengembangan wilayah Sulawesi Selatan ke depan. Pertumbuhan ekonomi masih tetap merupakan *keyword* dalam pidato para kepala daerah, terlepas bahwa hanya sekedar membaca dalam naskah pidatonya. Namun strategi menata dan mengonsepsikannya belum banyak yang bisa diamati. Pertumbuhan ekonomi yang memiliki konsep dasar dalam teori ekonomi lebih dipandang sebagai dampak belaka, bukan sesuatu yang justru perlu disiasati sebagai kinerja. Padahal justru pertumbuhan ekonomi itulah yang membawa dampak negatif dalam wujud ketimpangan, kemiskinan, pengangguran dan sejumlah permasalahan sosial ekonomi lainnya. Pertumbuhan ekonomi adalah sejatinya kinerja pembangunan, sehingga penting dikonsepsikan dalam perencanaan termasuk dalam memperhitungkan dampak negatif yang akan ditimbulkan.

Semakin dipertegas dengan hadirnya istilah pertumbuhan inklusif, bahwa pertumbuhan bukan sekedar dampak atau buah dari pembangunan. Melainkan kinerja yang memang telah dipertimbangkan dalam kerangka pembangunan, pertumbuhan *by-designed*. Oleh karena itu, dalam kerangka pengembangan wilayah patut dipikirkan bagaimana menabur

pusat pertumbuhan di wilayah. Dengan berpegang pada pertumbuhan inklusif, solusi penanganan permasalahan pemerataan dapat didiskusikan. Hanya saja pusat pertumbuhan yang dimaksudkan di sini bukan dalam makna kutub pertumbuhan sebagaimana yang dikenal selamaini.

Pusat pertumbuhan di tingkat wilayah membutuhkan kemampuan mengintegrasikan sebanyak-banyaknya kepentingan pembangunan antar *stakeholders* pembangunan. Dengan demikian pusat pertumbuhan yang berada pada skala provinsi, sekaligus berarti pula pada pembangunan dan atau pertumbuhan berkualitas. Secara teoritik maupun empirik, pertumbuhan yang bersifat inklusif terkait erat dengan pengembangan wilayah. Diperlukan pencermatan keberadaan sub-sub wilayah, sebagai contoh di Sulawesi Selatan pernah mengembangkan konsep wilayah sebagai pengembangan utama. Di Orde Baru, konsep wilayah pengembangan rupanya ikut direformasi. Konsep yang seperti ini patut dicermati kembali.

Dalam kerangka pembangunan nasional yang patut disasar adalah pengembangan wilayah provinsi, yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi pada skala provinsi lebih banyak didorong oleh pertumbuhan ekonomi nasional. Daya dorong tersebut tidak serta merta mampu memperkuat struktur perekonomian wilayah, bahkan sebaliknya lebih banyak menyedot marjin ekonomi yang tercipta di wilayah. Dapat diduga bahwa inilah yang kemudian menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional senantiasa fluktuatif atau terperangkap pada tingkat yang relatif rendah. Dengan demikian, diperlukan strategi pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi antara pusat dan wilayah. Konsep integrasi pertumbuhan yang berbasis wilayah patut menjadi strategi nasional, yang kemudian dijabarkan di tingkat wilayah atau provinsi.

Di tingkat wilayah, pada dasarnya dibutuhkan sebuah konfigurasi pengembangan sub-sub wilayah yang bertumpu pada potensi sumber daya manusia, sumber daya alam,

sumber daya teknologi serta dukungan infrastruktur pada masing-masing sub-sub wilayah dimaksud. Dengan demikian pengembangan sub-sub wilayah memang sepatutnya diletakkan sebagai kepentingan pengembangan wilayah. Masing-masing sub wilayah ini akan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan, yang berbasis dan mengacu pada pertumbuhan inklusif. Pada akhirnya akan berdampak pula pada pemerataan wilayah.

Sejauh ini dalam realitanya, pertumbuhan di wilayah umumnya dititikberatkan pada pertumbuhan sektoral. Hal ini patut dipahami, karena di satu pihak daya dorong pertumbuhan nasional yang berwawasan sektoral memang signifikan, di lain pihak wawasan wilayah belum banyak digunakan untuk mendorong pertumbuhan. Realitas yang ada selama ini, pertumbuhan ekonomi pada skala wilayah bersifat eksklusif, berdampak pada ketidakmerataan dan atau ketimpangan. Oleh karena itu, integrasi wawasan wilayah dan pertumbuhan ekonomi perlu dipikirkan secara lebih serius.

Perspektif wilayah di sini adalah wilayah berskala provinsi yang merupakan suatu kesatuan wilayah kabupaten dan kota yang sepatutnya terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan. Pengalaman menunjukkan bahwa skala ekonomi yang optimal akan mampu jika berperspektif wilayah provinsi. Pencapaian skala ekonomi pada tingkat kabupaten/kota menghadapi banyak kendala dan hambatan untuk dapat optimal, kecuali mampu diintegrasikan dan diinterkoneksi melalui sub-sub wilayah dalam suatu provinsi. Namun dalam kaitan ini, peran dan dorongan skala nasional menjadi hal yang niscaya.

Pusat pertumbuhan yang berbasis wilayah provinsi perlu didorong untuk menemukan substansi pembangunan ekonomi, baik yang memiliki *comparative advantage* melalui pencapaian skala ekonomi, yang mampu mengembangkan daya-saing wilayah.

Hal ini membutuhkan kerangka pengembangan dan fasilitasi yang di tingkat nasional, untuk selanjutnya dijabarkan pada skala wilayah. Wilayah perlu menyuarakannya,

dan pusat pun penting untuk memahami dan mengadopsinya. Skema kebijakan dan regulasi pada tingkat nasional dibutuhkan untuk memungkinkan setiap wilayah mengembangkan inisiatif dan kreatifitasnya masing-masing untuk mendesain pertumbuhan wilayahnya.

Pengembangan proses penciptaan nilai tambah sebagai esensi pokok pertumbuhan ekonomi, terhadap produk dan jasa yang tersedia dan potensial pada sub-sub wilayah perlu didorong dan difasilitasi. Hal ini yang pada gilirannya akan menciptakan perubahan dan penguatan struktur perekonomian sub-wilayah. Itu berarti, sejak awal pengembangan produk dan jasa sudah harus terpetakan prospek pengembangan industrialisasi. Dengan perubahan struktur perekonomian wilayah dan industrialisasi yang dimaksud akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru secara tersebar dalam suatu provinsi. Catatan kaki yang perlu diperhatikan adalah, sudah waktunya kerja sama dan keterkaitan antar sub-wilayah di provinsi perlu didorong dan difasilitasi.

Secara implisit namun juga perlu dipertegas dalam wawasan dan kerangka pikir di atas, bahwa penguatan pemerintahan pada skala provinsi menjadi faktor kunci keberhasilan. Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan dan pembangunan perlu diintegrasikan secara berhasil-guna. Pada akhirnya kehadiran pemerintahan dan pembangunan yang terintegrasi membutuhkan efektifitas *'unity of command'* pada skala provinsi. Oleh karena pada dasarnya kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas sejatinya terletak di wilayah yang mampu mewujudkan keterintegrasian.

Akhirnya, penataan pusat pertumbuhan wilayah semakin mendesak untuk dilakukan, bukan semata-mata untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pada kerangka pembangunan nasional, melainkan juga untuk memperkuat struktur pembangunan pada skala provinsi.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Koordinator Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JIKTI) dan dapat dihubungi melalui email madjid76@gmail.com



DUKUNG 9.000 PETANI KAKAO CAPAI PENDAPATAN HIDUP BERKELANJUTAN PADA 2030

PT Mars Symbioscience Indonesia, salah satu unit bisnis Mars Incorporated, pabrik cokelat yang telah beroperasi lebih dari 100 tahun, hari ini dengan bangga mengumumkan peluncuran program empat tahun (2022-2026), *Advancing Cocoa Agroforestry Towards Income, Value, and Environmental Sustainability (ACTIVE)* untuk meningkatkan penghidupan petani kakao.

Dalam program ini, Mars bekerja sama dengan beberapa organisasi terkemuka, *United States Agency for International Development (USAID)* dan *Institute for Development Impact (I4DI)*, dalam upaya komprehensif yang dirancang untuk mengatasi hambatan yang umumnya dihadapi oleh petani kakao untuk mencapai



Foto-foto: Dok. MARS

pendapatan hidup layak. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempromosikan praktik agroforestri kakao sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sekaligus meningkatkan mata pencaharian petani.

Mars, USAID, dan I4DI merancang program ACTIVE dengan tujuan memberi petani akses ke teknologi tepat guna, infrastruktur pasar, dan pembiayaan yang lebih baik. Program ACTIVE dirancang berdasarkan bukti yang dikumpulkan oleh Mars dan I4DI selama periode enam tahun, yang diharapkan dapat membekali petani dan keluarga mereka dengan model bisnis alternatif dan melaksanakan praktik yang menjanjikan untuk meningkatkan ketahanan terhadap iklim dan pendapatan rumah tangga.

“Melalui kemitraan dengan USAID dan I4DI, kami akan menguji dan mengidentifikasi pendekatan mana yang paling efektif untuk membantu petani mencapai pendapatan hidup yang berkelanjutan dan mewujudkan ekosistem kakao yang lebih beragam,” kata Fay Fay Choo, Mars Asia Cocoa Director. “Tujuan kami adalah agar dapat menggunakan pembelajaran dalam

program sebagai informasi dan cetak biru yang dapat ditingkatkan ke seluruh rantai pasokan untuk perubahan sistemik yang tahan lama.”

Dalam pelaksanaannya, program ACTIVE akan dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas 9.000 petani kakao di Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dan di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. ACTIVE akan bekerja sama dengan para peneliti, pelaku pasar (sektor swasta), asosiasi, pemerintah daerah, pelaksana program *agroforestry*, dan pemangku kepentingan kunci lainnya, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan.

Lembaga pemerintah yang akan terlibat dalam implementasi ACTIVE antara lain, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Sekilas Program

ACTIVE

Mitra Kolaborasi

USAID, I4DI

Durasi

4 tahun

Jangkauan

9.000 petani

Ambisi Dampak

Ditargetkan untuk meningkatkan pendapatan petani hingga 15% selama empat tahun dan mengurangi jumlah petani yang hidup di bawah tolok ukur pendapatan hidup layak hingga 20%.

Fokus Inovasi

Memfasilitasi petani untuk dapat menerapkan sistem agroforestri yang terukur dan berbasis bukti untuk memperkuat keanekaragaman hayati dan meningkatkan produksi kakao.

Memfasilitasi ekosistem pertanian kakao yang lebih beragam dengan merekomendasikan tanaman jangka pendek dan jangka panjang yang

tepat, membantu petani memperoleh pengetahuan dan peralatan guna mendukung diversifikasi tanaman, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah, sektor perdagangan, dan sektor swasta untuk menyediakan pasar yang menawarkan sumber pendapatan alternatif.

Mendukung terwujudnya inklusi keuangan dan memberikan kemudahan akses petani ke pembiayaan digital dan solusi asuransi tanaman untuk membantu membiayai peralihan menuju ekosistem pertanian kakao yang terdiversifikasi.

Mempertemukan kelompok pemerintah, industri, dan kelompok tani kunci untuk membantu menciptakan pasar dan aturan yang diperlukan untuk menyukseskan ekosistem pertanian kakao yang terdiversifikasi.

Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk mendorong pertanian kakao yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.

PT Mars Symbioscience Indonesia

PT Mars Symbioscience Indonesia adalah salah satu unit bisnis Mars, Incorporated, sebuah perusahaan global milik keluarga yang berkantor pusat di Mclean, Virginia, Amerika Serikat. Kami telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1996 dengan pendirian pabrik pengolahan kakao pertama di Kawasan Industri Makassar (KIMA), Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan Mars di Indonesia mempekerjakan sekitar 300 Rekan Kerja dengan dukungan lebih dari 200 Kontraktor.

Selain pabrik pengolahan kakao di Makassar, kami juga memiliki dua pabrik pengolahan biji kakao, di Kelurahan Noling dan Kecamatan Wotu, masing-masing terletak di Kabupaten Luwu dan Luwu Timur yang berfungsi sebagai pusat pembelian dan tempat pengolahan biji kakao berkualitas tinggi untuk pabrik kami di Makassar.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Mars, silakan mengunjungi www.mars.com. Bergabung bersama kami di Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn dan YouTube.

USAID

USAID adalah badan pembangunan internasional pertama Pemerintah Amerika Serikat yang memimpin pembangunan internasional dan upaya kemanusiaan untuk melindungi kehidupan, mengurangi kemiskinan, memperkuat

pemerintahan yang demokratis, dan membantu masyarakat mencapai kemandirian dan ketahanan. USAID memberikan bantuan pembangunan untuk membantu negara-negara mitra dalam perjalanan pembangunan negaranya dengan upaya untuk membantu dalam peningkatan kehidupan, pembangunan masyarakat, dan kemandirian.

I4DI

Institute for Development Impact (I4DI) adalah perusahaan konsultan penelitian, desain, dan manajemen yang berfokus pada penggunaan data yang dioptimalkan untuk mendorong keputusan strategis guna meningkatkan keberlanjutan global. I4DI bekerja sama dengan sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk memperantarai hubungan, menyusun keterangan, dan memfasilitasi kemitraan melalui tindakan guna

memecahkan beberapa tantangan paling mendesak di dunia. Sebagai perusahaan terdepan dalam teknologi, I4DI diakui atas kepemimpinannya dalam keberlanjutan rantai pasokan pertanian dan penerapan teknologi inovatif yang merangsang keterlibatan masyarakat dan ekonomi sirkular.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Kontak Media:

St. Hajerah - Communications Coordinator

email: st.hajerah@effem.com



LIDI MELINTAS NEGERI

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

DI Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang mahasiswi berusia 22 tahun berhasil mengekspor 25 ton sapu lidi ke India. Adalah Sadaria pengusaha muda yang masih duduk di bangku kuliah jurusan Manajemen di salah satu kampus swasta di Surabaya. Sadaria anak sulung dari tiga bersaudara.

Sejak masih duduk di bangku MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 1 Polewali Mandar, ia sudah mulai giat berbisnis. Berbagai usaha dijalankannya mulai jualan pulsa, minuman, *online shop* sampai ikut bisnis MLM (*Multi Level Marketing*). Bisnis adalah *passion*-nya, bahkan ketika ia diterima di 2 universitas setelah lulus MAN, ia memilih universitas swasta dengan jurusan bisnis ketimbang kampus negeri dengan jurusan berbeda.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dan *Owner CV Coco Mandar Indonesia*, Sadaria di depan mobil kontainer yang membawa 25 ton sapu lidi ke India di Lapangan Pancasila Pekkabata.
Foto: **Amri Makkaruba/Radar Sulbar**

Potensi alam berupa pohon kelapa di Polewali Mandar khususnya dan di Sulawesi pada umumnya, dilihat Sadaria sebagai sebuah peluang untuk dijadikan produk yang dapat menjadi komoditas ekspor. Untuk mempermudah manajemen dan pemasarannya, Sadaria mendirikan CV. Coco Mandar Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang hasil bumi, khususnya turunan kelapa. Hasil bumi tersebut dipromosikan melalui *website* bernama *cocomandar.com*. Perusahaannya mengembangkan 5 jenis produk turunan coco/kelapa yakni lidi kelapa, lidi sawit, lidi nipah, arang kelapa dan juga sabut kelapa.

Sebelum secara resmi Coco Mandar didirikan, Sadaria juga pernah mengeksport produk arang ke kota Baghdad, Irak dengan menggunakan nama perusahaan lain. Fokus produk kemudian dialihkan ke lidi dengan menyiapkan legalitas perusahaan CV. Coco Mandar Indonesia.

Tentunya di awal merintis usaha ekspor lidi ini, tantangan dihadapi Sadaria dan Tim, mulai dari mencari *buyer*, mencari pemasok lidi dan membangun kepercayaan kepada warga bahwa lidi bisa bernilai jual yang bagus.

Berbagai tantangan yang dihadapi Sadaria dan tim justru membuat semangatnya semakin besar untuk mencapai misi Coco Mandar yang salah

satunya adalah berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan.

Hal lain yang membuat Coco Mandar istimewa adalah kemampuan menembus pasar internasional dengan mengekspor produk lidi ke mancanegara. Hal ini tidak jarang menjadi kendala utama banyak usaha perdagangan yang ada. Untuk *buyer* atau pembeli Coco Mandar dari luar Indonesia, dapat terhubung dengan Sadaria melalui *website* <https://cocomandar.com>. Beberapa pembeli mengontak langsung melalui info kontak yang tertera di *website* dan ada juga yang dikontak langsung oleh Coco Mandar. Sadaria merasa *website* ini sangat membantu usahanya terhubung dengan *buyer* karena menurutnya melalui *website* ini bisa terlihat perjalanan bisnis Coco Mandar, jenis produk, spesifikasi dan info kontak.

Untuk memenuhi permintaan lidi dari *buyer*, Sadaria melakukan berbagai macam cara. Termasuk memberi edukasi ke masyarakat terkait potensi dari limbah daun kelapa yang selama ini tidak dianggap sebagai sebuah komoditas potensial oleh warga. Sadaria juga mencoba melibatkan sekolah madrasah tempatnya dulu belajar. Idenya adalah memberi peluang kepada pihak sekolah dan siswa untuk menjadi pemasok sapu lidi. Harapannya dari hasil penjualan sapu lidi ini bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan peralatan sekolah mereka agar dapat meringankan beban ekonomi para siswa, sehingga tidak perlu lagi meminta uang kepada orang tua, untuk memenuhi kebutuhan kecil.

Upaya lainnya dalam memenuhi permintaan lidi adalah melibatkan masyarakat di kampung Sadaria dan juga bekerja sama dengan pengepul. Untuk level peraut daun kelapa dari masyarakat, armada berupa mobil Coco Mandar siap menjemput ke rumah-rumah dengan sistem beli putus. Perkilogram sapu lidi dihargai Rp 800-Rp 2000. Untuk level pengepul akan mengantar sendiri ke CV Coco Mandar. Pengepul datang bukan hanya dari wilayah Sulawesi Barat, tapi juga dari Palu, Sulawesi Tengah dan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Jumlah *supply* pengepul dalam sekali drop bisa mencapai 2 hingga 3 ton.

Meski di usia yang terbilang muda, Sadaria memperoleh kepercayaan dari mitra dan juga pemerintah setempat. Menurut pemerintah

setempat yang terkait dengan usaha ekspor seperti Bea Cukai, Dinas Perdagangan dan Balai Karantina sangat mendukung usahanya dan usaha para pengeksport lainnya. Tidak jarang pihak Dinas Perdagangan sendiri yang aktif menghubungi untuk dapat memfasilitasi usaha mereka. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung penuh usaha sapu lidi Sadaria ini dan meminta agar selanjutnya sapu lidi bisa dikelola menjadi barang industri rumahan demi meningkatkan perekonomian warga setempat. Sadaria berhasil membuka banyak lowongan pekerjaan bagi warga setempat.

Eksport sapu lidi sebanyak 25 ton sapu lidi ke India dengan nilai kurang lebih Rp 50 juta-, tidak hanya mengundang perhatian warga namun juga perhatian pemerintah setempat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah kabupaten Polewali Mandar memberikan dukungan dengan memfasilitasi Sadaria melakukan ekspor 25 ton sapu lidi ke India. Pelepasan ekspor perdana produk pertanian berupa sapu lidi tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Muhammad Ali Baal Masdar serta sejumlah pejabat dari Bea Cukai.

Untuk target selanjutnya, saat ini CV. Coco Mandar Indonesia sedang menyiapkan permintaan 75 ton sapu lidi. Sadaria dan tim sedang menyusun strategi agar target ini bisa segera terpenuhi, harapannya ia bisa melibatkan lebih banyak mitra dan bermanfaat untuk masyarakat lebih luas.

Sadaria berharap, kegiatan ekspor sapu lidi yang digelutinya saat ini berjalan lancar serta memotivasi pemuda-pemudi lainnya untuk memaksimalkan setiap peluang usaha yang ada, agar kelak dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurutnya tantangan, kegagalan dan cerita pahit di awal merintis usaha harus dianggap sebagai penyemangat. Ia berpesan kepada pengusaha muda untuk berani mencoba, tidak takut rugi dan tidak takut gagal karena kegagalan menurutnya adalah pijakan untuk dapat terus bertumbuh.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi lebih lanjut mengenai artikel ini dapat menghubungi:
Sadaria (Presiden Direktur CV.Coco Mandar Indonesia)
Website: cocomandar.com, Instagram: [cocomandar.id](https://www.instagram.com/cocomandar.id)
Telp/WA: 0822-6487-4533



DISKUSI ONLINE

Instagram Story @infobakti



The Power of Storytelling

Sejak berusia 11 tahun, Safira Devi Amorita, *Co-Founder* Rumah Dongeng, telah berkiprah sebagai pendongeng cilik tingkat nasional. Ajang lomba bercerita tingkat SD yang dilaksanakan oleh Perpunas menjadikannya sebagai salah satu pendongeng cilik kala itu. Kini Safira telah menjejakkan kiprahnya di dunia internasional. BaKTI dan Safira sama-sama percaya akan kekuatan cerita atau *the Power of Storytelling*



Menjaga Kesehatan Reproduksi

Menjaga kesehatan reproduksi penting dilakukan bagi setiap orang. Hal tersebut dapat dimulai dari melakukan kebiasaan sederhana sehari-hari. Menjaga kesehatan reproduksi bukan hanya dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit, tapi juga mendukung untuk menghasilkan penerus keluarga dan generasi bangsa yang lebih baik.

Selengkapnya kunjungi <https://www.instagram.com/infobakti/channel>

Podcast BASUARA



Apa Katamu Tentang: Meneropong Kawasan Timur Indonesia

Meneropong Kawasan Timur Indonesia di podcast Basuara ini bercerita tentang pengalaman kami berkunjung ke daerah yang paling berkesan di kawasan timur Indonesia untuk pertama kalinya. Banyak hal yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya yang ditemui saat kami berkunjung ke Jayapura, Lanny Jaya, Sumba Timur, atau bahkan Makassar. Asumsi dan ekspektasi bisa jadi sangat berbeda dengan yang kami temui di tempat-tempat tersebut. Namun satu hal yang pasti, kami belajar banyak hal dari begitu setiap perjumpaan pertama tersebut.

Podcast BASUARA (BaKTI Pu Suara) adalah tempat berbagai cerita yang memberi inspirasi, memperkaya pengetahuan dari beberapa narasumber yang berkompeten untuk mendorong meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan.

Kunjungi Podcast Basuara melalui <http://bit.ly/basuara>

Artikel

Inilah Pengalaman Kami Para PRT: Mengikuti Forum Pekerja Perempuan Sedunia

Pada awal Juli 2022, sejumlah wakil Sekolah Pekerja Rumah Tangga/ SPRT berkesempatan mengikuti Forum Pekerja Perempuan Sedunia. Di sana mereka memaparkan kerja-kerja yang telah kami lakukan di Indonesia, termasuk perjuangan kami demi disahkannya UU Perlindungan PRT.

- <https://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/inilah-pengalaman-kami-para-prt-mengikuti-forum-pekerja-perempuan-sedunia>

Referensi

Mengenal Kelompok Last Mile dalam Upaya Memberantas Perilaku BABS



Empat dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan belum bebas dari praktik BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Ada fakta menarik tentang hambatan yang menyebabkan keempat daerah yang dimaksud belum bebas dari praktik BABS. Sejak tahun 2020 capaian akses sanitasi jambannya sudah di atas angka 80% (Monev STBM Kemenkes, Desember 2020). Namun jadi melambat, bahkan cenderung stagnan, dalam perjalanan mencapai akses 100% sanitasi

Fakta-fakta yang menjadi penghambat itu terungkap dari studi kelompok Last Mile (kelompok terakhir warga yang belum memiliki akses sanitasi jamban sehat keluarga) yang dilaksanakan pada tahun 2020-2021 di kabupaten Pangkep, Maros dan Jeneponto. Studi tersebut bertujuan untuk menemukan pokok masalah dan faktor penyebab masih adanya sebagian warga masyarakat yang belum mengakses sanitasi jamban sehat.

- <https://www.batukarinfo.com/referensi/mengenal-kelompok-last-mile-dalam-upaya-memberantas-perilaku-babs>

Berita Terbaru

Menjadikan Biak Poros Maritim Dunia di Pasifik

Kabupaten Biak Numfor, Papua, merupakan daerah kepulauan di Provinsi Papua yang kaya dengan potensi alam, baik perikanan dan pariwisata bahari. Biak juga berpotensi menjadi poros maritim dunia di Pasifik karena letaknya yang sangat strategis. Pulau Biak berada di daerah khatulistiwa yang berdekatan dengan berbagai negara di kepulauan Pasifik. Berbagai negara besar di dunia melirik potensi Biak sebagai daerah kepulauan yang kaya dengan sumber daya alam serta wisata bahari. Untuk menuju poros maritim dunia di Pasifik, ada beberapa aspek yang perlu disiapkan yakni pembangunan kemaritiman yang mencakup aspek infrastruktur, politik, sosial-budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi.

- <https://www.batukarinfo.com/news/menjadikan-biak-poros-maritim-dunia-di-pasifik>